

## **PENGANTAR ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT**

Ade Heryana, SSt, MKM

**Email: heryana@esaunggul.ac.id**

Dosen Prodi Kesmas, FIKES Universitas Esa Unggul

### **TUJUAN PEMBELAJARAN**

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian Etika Kesehatan Masyarakat, serta perbedaan ruang lingkup dengan bidang etika lainnya
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian Hukum Kesehatan Masyarakat, serta perbedaan dengan hukum kesehatan lainnya
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan isu-isu yang dipelajari dan dibahas dalam etika kesehatan masyarakat dan hukum kesehatan masyarakat
4. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kode etik profesi Kesehatan Masyarakat serta jenis-jenis hukum kesehatan masyarakat

### **PENDAHULUAN**

#### ***Pentingnya Etika Kesehatan Masyarakat***

Bagi sarjana kesehatan masyarakat, mata kuliah etika dan hukum kesehatan berguna dalam pemenuhan salah satu dari delapan kompetensi Ahli Kesmas, yaitu keterampilan mengembangkan perencanaan, program dan kebijakan kesehatan. Ahli Kesmas tidak hanya cakap dalam membuat program dan kebijakan, namun juga mampu mempertimbangkan etika dan hukum yang berlaku. Salah satu aspek dalam etika kesehatan masyarakat adalah etika program dan kebijakan kesehatan.

Masalah etika dalam bidang kesehatan masyarakat merupakan hal yang sudah diperbincangkan sejak dulu. Etika kesehatan masyarakat umumnya berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh adalah konflik kepentingan yang dialami dokter okupasi atau klinisi yang telah bekerja bertahun-tahun di industri yang berisiko tinggi (misalnya industri asbes). Biasanya dokter perusahaan berada dalam kondisi "serba salah". Di satu sisi harus mengikuti keinginan manajemen perusahaan agar tidak terlalu mengekspos informasi bahaya kepada karyawan agar tidak mengganggu proses produksi. Di sisi lain, ada pertentangan hati nurani dalam dokter karena setiap karyawan memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang bahaya kerja dan tentu saja bertentangan kode etik profesi jika tidak menyampaikan risiko/bahaya kesehatan (Jameston, 1995).

Etika kesehatan masyarakat juga berkaitan dengan ketidaksesuaian atau pertentangan antara kewenangan pemerintah (sebagai pengelola sistem pelayanan kesehatan) dengan kebebasan individu. Misalnya kajian ahli kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa pemberian vaksinasi harus dengan jadwal yang ketat, perlu diberikan fluorida dalam air minum, dan melarang anak sekolah minum air tinggi kadar glukosa. Pada kenyataannya, masih terdapat kebijakan yang pemerintah

bertentangan dengan ketiga hal tersebut (Schmidt, 2013). Sebenarnya menurut Baylis et al (2008), etika kesehatan masyarakat harus dimulai dengan merekomendasikan nilai-nilai inti dari kesehatan masyarakat, bukan memodifikasi nilai-nilai yang akan digunakan dalam proses interaksi dalam pelayanan kesehatan (Thompson & Robertson, 2013).

Pada abad 21 ini, di negara berkembang sebagian besar kebijakan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor-faktor yang disebut Gaya Hidup (*life-style factors*) yang merupakan faktor risiko kejadian penyakit yang mematikan seperti penyakit jantung dan kanker. Permasalahannya, sebagian besar masyarakat menganggap gaya hidup sebagai pilihan, misalnya memilih untuk merokok atau tidak merokok. Pilihan gaya hidup ini sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah maupun dengan industri. Seseorang yang memilih tetap merokok atau mulai merokok bersinggungan dengan kebijakan kesehatan di bidang tembakau, sedangkan mereka yang tidak merokok akan bersinggungan dengan kebijakan ekonomi yang mengatur cukai rokok (College, 2008).

Permasalahan tersebut di atas dipelajari dengan baik dalam bidang ilmu yang disebut Etika Kesehatan Masyarakat (*Public Health Ethics*). Disiplin ilmu ini juga berguna dalam menjelaskan masalah-masalah dalam kesmas dengan berbagai cara. Etika kesehatan masyarakat mampu menjelaskan:

1. Pengertian profesi/ahli kesehatan masyarakat dan etika praktis profesi;
2. Besaran dan nilai moral yang berkaitan dengan kesehatan kesejahteraan masyarakat;
3. Topik-topik dan permasalahan yang selalu muncul dalam kesehatan masyarakat; dan
4. Peran advokasi untuk mencapai populasi yang lebih sehat dan lebih aman.

Etika kesehatan masyarakat juga dapat membantu ahli kesmas dalam membuat keputusan, menentukan pada yang harus dilakukan dan mengapa hal tersebut dilakukan. Ortmann dkk (2016) menyatakan etika kesehatan masyarakat membantu dalam memutuskan tindakan-tindakan yang mempengaruhi kesehatan komunitas dan populasi berdasarkan bukti ilmiah serta sesuai dengan nilai-nilai dan standar (baik atau buruk) yang diterima masyarakat.

### ***Pentingnya Hukum Kesehatan Masyarakat***

Selain itu untuk menjalankan fungsinya terutama upaya peningkatan dan pencegahan, maka perlu didukung juga dengan perangkat yang disebut Hukum Kesehatan Masyarakat. Contohnya dalam upaya mengurangi dampak rokok bagi masyarakat, terdapat Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang menyatakan bahwa rokok merupakan zat adiktif yang menyebabkan bahaya untuk kesehatan individu maupun masyarakat. Produk hukum ini mengatur berbagai aturan tentang peredaran rokok agar tidak merugikan kesehatan, seperti kandungan nikotin, tar, produksi, penjualan, iklan, sampai penetapan kawasan rokok. Adanya produk hukum kesehatan ini ternyata efektif dalam mengurangi dampak kesehatan salah satunya melalui jalur tuntutan akan dampak merokok. Diberitakan dalam tirto.id, seorang ibu berusia 50 tahun menuntut ganti rugi kepada dua perusahaan rokok besar di Indonesia sebesar lebih dari Rp 1 Triliun

karena dianggap telah menyebabkan dirinya selalu berobat sejak tahun 2005 akibat merokok selama 25 tahun<sup>1</sup>.

Kebutuhan akan hukum di bidang kesehatan masyarakat makin kuat ketika terjadinya perubahan dalam paradigma kesehatan. Sebelumnya upaya kesehatan lebih ditujukan kepada upaya-upaya pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Makin lama masalah kesehatan makin dinamis dan bergeser kepada upaya yang lebih efektif yaitu peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif). Masyarakat makin membutuhkan produk hukum yang mengatur upaya-upaya tersebut seperti kesetaraan dalam pelayanan kesehatan, vaksinasi, pemberdayaan bidang kesehatan, dan sebagainya.

Pentingnya hukum kesehatan masyarakat di Indonesia ditandai dengan adanya penggantian terhadap Undang-undang Kesehatan No.23 tahun 1992<sup>2</sup> menjadi Undang-Undang No.36 tahun 2009. Undang-undang ini mengakomodir amandemen (perubahan terhadap pasal-pasal pelayanan kesehatan dalam UUD RI, yaitu:

1. Amandemen (perubahan) kedua pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak ... memperoleh pelayanan kesehatan”; dan
2. Amandemen (perubahan) keempat pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Maka berdasarkan perubahan UUD RI tersebut, UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur masalah pelayanan kesehatan lebih terperinci termasuk sangsi kurungan/penjara dan denda yang lebih berat. Salah satunya dalam upaya mengurangi dampak rokok terhadap kesehatan, pada pasal 199 bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar Kawasan Tanpa Rokok dipidana denda paling banyak Rp 50 juta<sup>3</sup>. Dengan demikian hukum kesehatan masyarakat berfungsi dalam memberikan kepastian hukum yaitu aturan-aturan serta sangsi-sangsi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT

### ***Karakteristik Etika Kesehatan Masyarakat***

Dalam bidang kesehatan terdapat beberapa bidang etik yang sudah berkembang yaitu etika klinis, etika penelitian, dan etika profesi, yang seluruhnya bernaung dalam satu payung yang disebut Bioetik. Di antara ketiga bidang etik itu, etika kesehatan masyarakat merupakan topik yang relatif paling baru. Tidak mengherankan jika pada praktisi kesehatan masyarakat telah lebih dulu mengenal bidang etika lain sebelum etika kesmas. Namun demikian seluruh bidang etika tersebut sama-sama memiliki empat prinsip utama bioetika (Ortmann dkk, 2016) yaitu

1. Memberi manfaat bagi manusia (*beneficence*)

---

<sup>1</sup> Disadur dari <https://tirto.id/menuntut-perusahaan-rokok-akibat-kecanduan-mungkinkah-cF1l> diakses 7 April 2018

<sup>2</sup> UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan menggantikan UU tentang Pokok Kesehatan tahun 1960

<sup>3</sup> Pasal 190 s/d 201 UU No.36 tahun 2009 mengatur ketentuan pidana yang lebih berat dibanding UU No.23 tahun 1192

2. Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang memperburuk manusia (*Nonmaleficence*)
3. Respek/menghormati manusia (*respect for persons/autonomy*); dan
4. Bertindak adil (*justice*)

Namun demikian, etika kesehatan masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang etika lain, terutama dengan etika klinis. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Etika Klinis dan Etika Kesehatan Masyarakat (Sumber: Ortmann, 2016, hal. 23)**

Etika Klinis	Etika Kesehatan Masyarakat
Mengobati penyakit dan cedera	Mencegah penyakit dan cedera
Intervensi medis oleh klinisi profesional	Intervensi kesehatan oleh berbagai profesi
Memperhatikan manfaat individu	Memperhatikan manfaat sosial, komunitas, dan populas
Berbagai larangan/pantangan dalam medis dilakukan berdasarkan hubungan fidusia antara pasien dan dokter	Berbagai larangan/pantangan dalam perilaku sehat dilakukan berdasarkan tindakan kolektif
Menghormati pasien sebagai individu	Menghormati masyarakat sebagai warganegara yang otonom dan independen
Tugas klinisi memastikan pasien tertarik melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan	Tugas ahli kesmas menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak dapat diselesaikan secara individu melainkan secara kolektif
Dokter dengan prestasi, kepercayaan, dan profesionalitas menyeluruh memiliki kewenangan/otoritas yang tinggi	Kewenangan ditentukan berdasarkan hukum sebagai alat bagi kebijakan kesmas untuk menciptakan regulasi kesehatan
<i>Informed consent</i> diperoleh dari pasien secara individu untuk tindakan medis tertentu	<i>Informed conssent</i> diperoleh dari komunitas dan konsensus bersama yang dibangun melalui dialog dan kolaborasi masyarakat
Masalah keadilan sebagai besar berfokus pada keadilan dalam mendapat pengobatan dan akses pelayanan kesehatan yang universal	Masalah keadilan berpusat pada keadilan sosial terutama dalam kesehatan dan kesamaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan

Sementara itu Power & Fadens (2006) membedakan ruang lingkup antara etika profesi, etika penelitian, etika klinis, dan etika kesehatan masyarakat, yang diringkas pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Perbedaan Antara Etika Profesi, Etika Penelitian, Etika Klinis, dengan Etika Kesehatan Masyarakat (Powers & Fadens, 2006)**

Karakteristik	Etika Profesi	Etika Penelitian	Etika Klinis	Etika Kesehatan Masyarakat
<b>Produk</b>	Kode etik profesi	Regulasi dan kebijakan	Hubungan dokter-pasien	Keselamatan, kesejahteraan publik (kebijakan publik)

Karakteristik	Etika Profesi	Etika Penelitian	Etika Klinis	Etika Kesehatan Masyarakat
<b>Pemangku kepentingan</b>	Profesional kesehatan	Subyek penelitian dan peneiti	Praktisi, pasien, wali pasien	Komunitas, kelompok khusus
<b>Prinsip Bioetik</b>	Beneficience	Autonomy, Non-maleficience, Justice	Autonomy, Beneficience, Non-maleficience	Justice
<b>Proses pengambilan keputusan</b>	Publik (tetapi diarahkan oleh profesional)	Publik (legal, hukum kriminal/pidana)	Privat (legal, hukum sipil/perdata)	Publik (tetapi diarahkan oleh pihak yang mewakili)

### **Definisi Etika Kesehatan Masyarakat**

CDC (2011) mendefinisikan etika kesehatan masyarakat sebagai sebuah proses menentukan tindakan. Menurut CDC, *“public health ethics is a systematics process to clarify, priotitize, and justify possible courses of public health action based on ethical principles, values and beliefs of stakeholders, and scientific and other information”*. Dengan demikian etika kesehatan masyarakat berfungsi dalam mengklarifikasi, menentuka prioritas, dan mempertimbangkan tindakan-tindakan kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip etik, nilai-nilai dan kepercayaan dari masyarakat, serta berdasarkan ilmu pengetahuan dan informasi lainnya.

Sementara Barrett dkk (2016) mendefinisikan etika kesehatan masyarakat bukan sebagai proses saja melainkan sebagai aplikasi etik, *“public health ethics can be seen both as the application of principles and norms to guide the practice of public health and as a process for identifying, analyzing, and resolving ethical issues inherent in the practice of public health”*. (terjemahan bebas, Etika kesehatan masyarakat dapat dilihat dalam dua hal yaitu pertama sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur pekerjaan ahli kesehatan masyarakat, atau sebagai proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah atau isu-isu etik yang berkaitan dengan pekerjaan ahli kesehatan masyarakat). Dengan demikian etika kesehatan masyarakat bisa dianggap sebagai aplikasi norma-norma dan proses penyelesaian masalah etik kesehatan masyarakat.

Seperti juga Barrett dkk di atas, Powers dan Faden (2006) mendefinisikan Etika Kesehatan Masyarakat dalam dua perspektif berbeda, yaitu sebagai bidang studi (teoritis) dan sebagai bidang praktis (aplikasi).

- a. Sebagai bidang studi, dinyatakan *“understand and clarify principles and values guiding public health action”* atau etika kesehatan masyarakat berusaha memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur tindakan atau kegiatan dalam kesehatan masyarakat.
- b. Sementara sebagai bidang praktis, dinyatakan *“apply the relevant principles and values to public health decision making”* atau etika kesehatan masyarakat

mengimplementasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang relevan dalam rangka pengambilan keputusan.

Dari definisi tersebut, etika kesehatan masyarakat juga berupaya mengidentifikasi dan menjelaskan “dilema etis” yaitu pertentangan antar prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Kemudian berupaya menganalisis tindakan-tindakan alternatif dan berbagai konsekuensi yang didapat untuk memecahkan dilema tersebut.

Lebih lanjut Callahan & Jennings dalam Gostin (2002) melihat etika kesehatan masyarakat bukan hanya dari sudut pandang teori dan praktis, namun juga advokasi. Dikatakan bahwa etika kesehatan masyarakat dapat dilihat dalam tiga perspektif, yaitu

1. *Professional ethics*;
2. *Applied ethics*; dan
3. *Advocacy ethics*.

Secara lengkap perspektif tersebut disajikan pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Perspektif Etika Kesehatan Masyarakat (Callahan & Jennings, 2002)**

Perspektif	Keterangan
Etika profesi ( <i>Professional Ethics</i> atau <i>Ethics of Public Health</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensi etis pada profesi</li> <li>• Kepercayaan moral masyarakat yang diberikan kepada profesional/ahli kesmas untuk bertindak yang trbaik untuk masyarakat</li> </ul>
Etika praktis ( <i>Applied Ethics</i> atau <i>Ethics in Public Health</i> ; Berorientasi pada situasi dan kasus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensi etis pada organisasi kesehatan masyarakat</li> <li>• Moral yang diyakini populasi sehat</li> <li>• Pilihan antara kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi</li> <li>• Keadilan sosial: kesetaraan dalam alokasi manfaat dan beban</li> </ul>
Etika advokasi ( <i>Advocacy ethics</i> atau Etika yang berorientasi pada tujuan atau populis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai-nilai utama dalam komunitas yang sehat</li> <li>• Melayani minat masyarakat, terutama dalam hal kekuasaan dan penindasan</li> <li>• Metode yang dipakai: pragmatis dan politis</li> </ul>

Sumber: Gostin, 2002

### **Kode Etik Kesehatan Masyarakat**

Di Indonesia hingga saat ini belum diatur dengan jelas kode etik profesi Kesehatan Masyarakat. Namun demikian, sebagai referensi kita dapat mengacu kepada kode etik pofesi kesehatan masyarakat menurut *Public Health Leadership Society version 2.2* yang menyatakan terdapat 12 kode etik kesehatan masyarakat yang disusun mengacu kepada 11 prinsip nilai-nilai dan kepercayaan yang meliputi kesehatan (*health*), komunitas (*community*), dan landasan aksi (*bases action*). Adapun 11 prinsip nilai-nilai dan kepercayaan tersebut antara lain:

### ***Kesehatan (Health)***

- a. Setiap manusia memiliki hak terhadap sumberdaya kesehatan yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan *Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Artikel ke-25) yang berbunyi “setiap orang memiliki hak mendapat standar kehidupan yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya..”

### ***Komunitas (community)***

- b. Setiap manusia merupakan makhluk sosial dan saling tergantung satu dengan yang lain. Manusia berupaya saling melakukan kerjasama baik dalam pertemanan, keluarga, dan komunitas, serta saling mendukung dalam keselamatan dan keberlangsungan hidup. Komunitas yang sehat ditandai dengan adanya hubungan positif antar individu dan antar lembaga sosial. Dengan demikian pemenuhan hak individu secara fisik harus diimbangi dengan kenyataan bahwa tindakan seseorang mempengaruhi orang lain.
- c. Efektifitas lembaga sosial dalam masyarakat bergantung pada kepercayaan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik tersebut antara lain: komunikasi, pernyataan jujur, transparansi (tidak ada informasi yang disembunyikan), akuntabilitas, reliabilitas, dan resiprokal (saling menguntungkan). Mau mendengarkan keluhan masyarakat merupakan masalah kritis dalam resiprokal dan komunikasi, sehingga bukan hanya ingin berbicara kepada masyarakat.
- d. Elemen kunci bagi Kesehatan Masyarakat adalah Kolaborasi. Infrastruktur kesehatan masyarakat dibangun dengan oleh berbagai pihak dan disiplin profesi yang berbeda-beda. Agar efektif maka para pihak dan profesional tersebut harus saling bekerja bersama-sama. Setiap tantangan baru dalam kesehatan masyarakat harus diatasi dengan kolaborasi.
- e. Terdapat saling ketergantungan antara setiap orang dengan lingkungannya. Orang tergantung pada sumberdaya alam dan lingkungan yang dibangun untuk kehidupannya. Kesehatan seseorang akan terganggu jika terjadi ketidakseimbangan atau kerusakan lingkungan serta adanya kesalahan dalam merancang lingkungan hidup. Sebaliknya, manusia dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan hidup akibat konsumsi berlebihan terhadap sumberdaya dan penumpukan limbah/sampah oleh manusia.
- f. Setiap orang dalam komunitas memiliki kesempatan yang sama berkontribusi dalam wacana publik. Kontribusi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun diwakilkan dalam sistem pemerintahan.
- g. Fokus utama Kesehatan Masyarakat adalah mengidentifikasi dan meningkatkan kebutuhan dasar kesehatan pada komunitas. Dengan demikian kesehatan masyarakat harus memastikan bahwa kesehatan komunitas tertentu melibatkan struktur masyarakat setempat, yang diarahkan pada penemuan penyebab utama penyakit dan pencegahan penyakit.

### ***Landasan dalam Bertindak (Bases Action)***

- h. Ilmu pengetahuan merupakan landasan yang penting dan kuat dalam bertindak. Pemahaman akan perlindungan terhadap penyakit diperoleh melalui penelitian

- dan akumulasi konsep dalam ilmu pengetahuan. Disamping itu membagi ilmu pengetahuan merupakan kewajiban moral setiap orang.
- i. Sains merupakan dasar utama dalam ilmu kesehatan masyarakat. Metode-metode (baik kuantitatif maupun kualitatif) dalam sains dan kolaborasi sains berkontribusi terhadap identifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan sehat/sakit, serta bagi evaluasi kebijakan dan program kesehatan untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan.
  - j. Setiap orang bertanggung jawab terhadap tindakan mereka yang ditunjang oleh pengetahuannya. Setiap kesenjangan akan informasi secara aktif akan dicari oleh setiap orang, sehingga kesehatan masyarakat setiap waktu harus menerjemahkan informasi yang didapat ke dalam tindakan.
  - k. Tindakan sebaiknya tidak dilandasi pada informasi sepihak. Seringkali tindakan dilakukan tanpa adanya informasi secara keseluruhan. Pada kondisi demikian, dibutuhkan nilai-nilai dalam bertindak. Sehingga kebijakan dibutuhkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan martabat setiap manusia.

Apabila dibaca secara keseluruhan, kode etik ini ditujukan kepada tiga subyek utama yaitu profesi/ahli kesehatan masyarakat, program/kebijakan kesehatan masyarakat, dan lembaga kesehatan masyarakat. Adapun 12 kode etik kesehatan masyarakat tersebut jika dikategorisasikan ke dalam tiga subyek utama tersebut adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

#### **Kode etik bagi profesi/ahli kesehatan masyarakat**

1. *Public health should address principally the fundamental causes of disease and requirements for health, aiming to prevent adverse health outcomes*  
(Profesi kesehatan masyarakat sebaiknya secara prinsip mengetahui penyebab paling mendasar dari penyakit dan kebutuhan terhadap kesehatan, yang bertujuan untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan);
2. *Public health should achieve community health in a way that respects the rights of individuals in the community*  
(Profesi kesehatan masyarakat sebaiknya menghormati hak asasi individu dalam komunitas dalam rangka memahami kesehatan masyarakat);
3. *Public health should advocate for, or work for the empowerment of, disenfranchised community members, ensuring that the basic resources and conditions necessary for health are accessible to all people in the community*  
(Profesi kesehatan masyarakat sebaiknya bekerja atau memberikan advokasi dalam rangka pemberdayaan anggota masyarakat yang lemah dalam memperoleh haknya sebagai warga negara, memastikan sumberdaya dasar dan kondisi yang dibutuhkan bagi pelayanan kesehatan dapat diakses dengan baik oleh seluruh orang dalam masyarakat/komunitas);
4. *Public health should seek the information needed to implement effective policies and programs that protect and promote health.*

---

<sup>4</sup> Urutan yang sebenarnya tentang kode etik kesehatan masyarakat dapat dilihat dalam *Principles of Ethical Practice of Public Health* dari *Public Health Leadership Society*. Dapat diunduh pada alamat website berikut: [https://www.apha.org/~media/files/pdf/membersgroups/ethics\\_brochure.ashx](https://www.apha.org/~media/files/pdf/membersgroups/ethics_brochure.ashx)



(Profesi kesehatan masyarakat sebaiknya memperhatikan kebutuhan informasi dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang efektif dalam rangka mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan);

### **Kode etik bagi program/kebijakan/prioritas kesehatan masyarakat**

5. *Public health policies, programs, and priorities should be developed and evaluated through processes that ensure an opportunity for input from community members*  
(Program/kebijakan/prioritas dalam kesehatan masyarakat sebaiknya mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan, program, dan prioritas dalam kesehatan masyarakat, melalui proses yang memungkinkan anggota masyarakat dapat memberikan masukan-masukan);
6. *Public health programs and policies should incorporate a variety of approaches that anticipate and respect diverse values, beliefs, and cultures in the community.*  
(Program dan kebijakan kesehatan masyarakat sebaiknya menggunakan pendekatan yang berbeda-beda untuk mengantisipasi dan menghargai perbedaan nilai, kepercayaan dan budaya di masyarakat);
7. *Public health programs and policies should be implemented in a manner that most enhances the physical and social environment.*  
(Program dan kebijakan kesehatan masyarakat sebaiknya diimplementasikan semaksimal mungkin untuk meningkatkan lingkungan fisik dan sosial);

### **Kode etik bagi lembaga-lembaga kesehatan masyarakat**

8. *Public health institutions should provide communities with the information they have that is needed for decisions on policies or programs and should obtain the community's consent for their implementation*  
(Lembaga-lembaga di bidang kesehatan masyarakat sebaiknya memberikan informasi yang mereka miliki kepada masyarakat, yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dan program, dan sebaiknya mendapatkan persetujuan dari masyarakat dalam implementasinya);
9. *Public health institutions should act in a timely manner on the information they have within the resources and the mandate given to them by the public.*  
(Lembaga-lembaga di bidang kesehatan masyarakat sebaiknya selalu memperbaharui informasi yang dimilikinya dengan sumberdaya dan mandat yang diberikan oleh masyarakat);
10. *Public health institutions should protect the confidentiality of information that can bring harm to an individual or community if made public. Exceptions must be justified on the basis of the high likelihood of significant harm to the individual or others.*  
(Lembaga-lembaga kesehatan masyarakat sebaiknya menjaga kerahasiaan informasi yang akan merugikan individu atau masyarakat jika dipublikasikan. Pengecualian diberikan dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan kerugian pada individu dan lainnya);
11. *Public health institutions should ensure the professional competence of their employees.*

(Lembaga-lembaga kesehatan masyarakat sebaiknya memastikan kompetensi yang dimiliki anggotanya); dan

12. *Public health institutions and their employees should engage in collaborations and affiliations in ways that build the public's trust and the institution's effectiveness*

(Lembaga-lembaga kesehatan masyarakat dan anggotanya sebaiknya selalu berkolaborasi dan berafiliasi agar kepercayaan publik dan efektifitas lembaga dapat ditingkatkan).

## HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT

### ***Pengertian dan Ciri-ciri Hukum Kesehatan***

Sebelum membahas lebih mendalam tentang hukum kesehatan masyarakat, ada baiknya kita mengetahui tentang hukum kesehatan beserta ciri-cirinya. Dalam Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia disebutkan pengertian Hukum Kesehatan sebagai berikut (Siswati, 2013):

*“Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam aspek organisasi, sarana pedoman medis nasional/ internasional, hukum di bidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan”*

Dari deifinisi di atas, ciri-ciri hukum kesehatan antara lain:

1. Seperangkat ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan;
2. Mengatur hubungan hukum antara dua pihak, yaitu:
  - a. Penyelenggara pelayanan kesehatan
  - b. Penerima pelayanan kesehatan
3. Terdapat aspek-aspek: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, organisasi, dan sarana;
4. Diterapkan kaidah-kaidah hukum perdata, pidana, dan administrasi negara;
5. Terdapat sumber-sumber hukum yang berasal dari: ketentuan-ketentuan hukum nasional, pedoman-pedoman medis nasional, pedoman medis internasional, hukum kebiasaan, yurisprudensi, serta ilmu pengetahuan dan literatur medis; dan
6. Mencakup hukum kedokteran (sehingga hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan)

Pada saat ini hukum kesehatan sebenarnya terbagi atas dua jenis yaitu 1) Hukum kesehatan masyarakat (*public health law*) yang lebih meitikberatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan kesehatan rumah sakit; dan 2) Hukum kedokteran (*medical law*) yang lebih mengatur pelayanan kesehatan pada individu. Namun demikian baik hukum kesehatan masyarakat dan hukum kedokteran sama-sama mencakup pelayanan kesehatan. Pada artikel ini akan dipelajari secara mendalam tentang hukum kesehatan masyarakat atau *public health law*.

## **Hukum Kesehatan Masyarakat**

Gostin & Wiley (2016) mendefinisikan hukum kesehatan masyarakat dalam bukunya berjudul *“Public Health Law: Power, Duty, Restraint”* sebagai berikut:

*“Public health law is the study of the legal powers and duties of the state to assure the conditions for people to be healthy (to identify, prevent, and ameliorate risks to health in the population) and the limitations on the power of the state to constrain the autonomy, privacy, liberty, proprietary, or other legally protected interests of individuals for the common good. The prime objective of public health law is to pursue the highest possible level of physical and mental health in the population, consistent with the values of social justice”.*

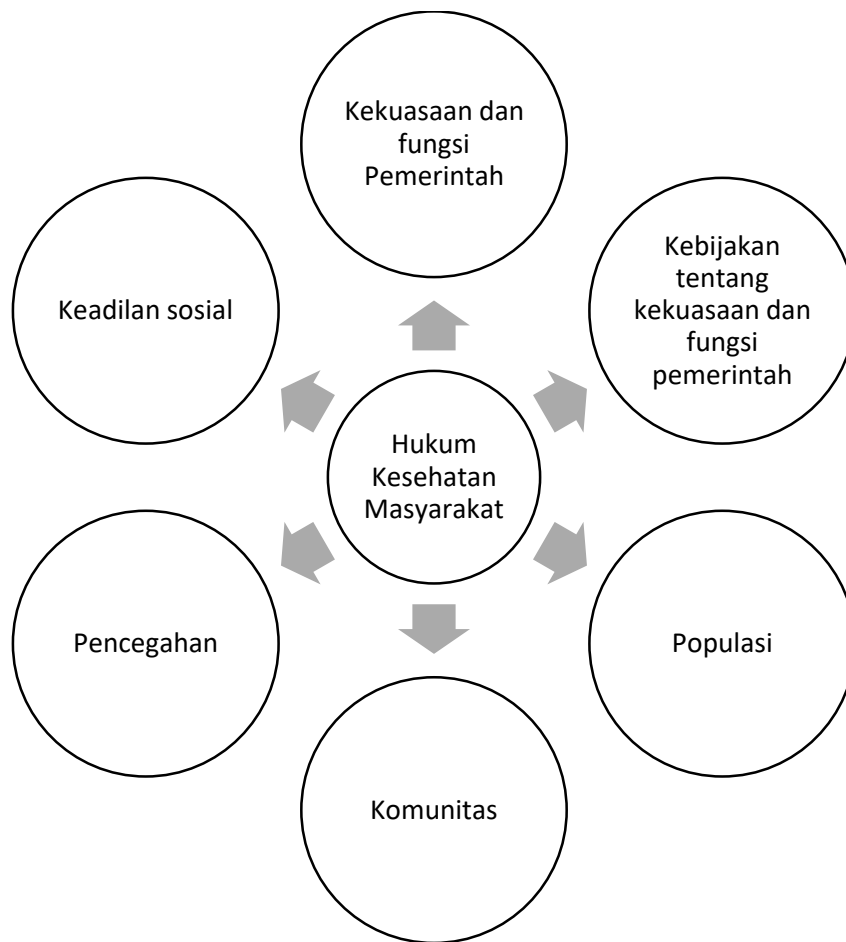
Secara bebas, definisi diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut: Hukum Kesehatan Masyarakat adalah ilmu yang mempelajari tentang:

1. Kekuasaan dan fungsi-fungsi legal negara untuk memastikan kondisi yang sehat bagi penduduk, melalui identifikasi, pencegahan, dan memperbaiki risiko kesehatan di masyarakat; dan
2. Keterbatasan kekuasaan negara dalam mencegah otonomi, privasi, kebebasan, hak milik, atau upaya legal lainnya dalam melindungi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Tujuan utama hukum kesehatan masyarakat adalah mendapatkan tingkat kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial.

Dalam hukum kesehatan masyarakat terdapat enam nilai-nilai penting yang dapat dikembangkan (Gostin & Wiley, 2016 dan Goodman, 2007) sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 yaitu:

1. Kekuasaan dan fungsi pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab utama (tetapi tidak eksklusif) dari pemerintah. Pemerintah menciptakan kebijakan, serta memberlakukan hukum dan kebijakan dalam merancang perlindungan terhadap kesehatan komunitas.
2. Kebijakan tentang kekuasaan dan keterbatasan negara yang berisi paksaan yang dilakukan untuk melindungi keseimbangan dalam kesehatan masyarakat dengan memperhatikan hak asasi individu. Paksaan tersebut diberlakukan terhadap individu dan masyarakat, bukan hanya anjuran untuk menjalankan upaya kesehatan secara sukarela.
3. Fokus pada populasi dengan memecah-mecah risiko kesehatan, serta menerapkan intervensi skala besar untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan komunitas, dengan memperhatikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
4. Mengutamakan jaringan sosial yang sehat, dukungan saling menguntungkan, dan keterlibatan masyarakat sipil. Pemberdayaan komunitas dapat menghasilkan kegiatan promosi kesehatan yang efektif.
5. Orientasi pada pencegahan yaitu melakukan intervensi untuk mengurangi risiko atau menghindarkan masalah kesehatan akibat cedera dan penyakit; dan
6. Komitmen terhadap keadilan sosial, yaitu memberikan pengobatan kepada kelompok dan individu secara adil dan setara dengan memperhatikan ketidakberuntungan pada masyarakat tertentu.



**Gambar 1. Nilai-nilai Utama dalam Hukum Kesehatan Masyarakat**

### ***Intervensi Legal dalam Kesehatan Masyarakat***

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilakukan dengan berbagai intervensi. Salah satu intervensi yang bisa dilakukan adalah dengan intervensi secara hukum atau disebut dengan *Legal Intervention*. Dengan demikian Hukum Kesehatan Masyarakat sebaiknya dipandang secara luas sebagai kewenangan dan tanggung jawab masyarakat yang terorganisir untuk memastikan tingginya derajat kesehatan komunitas. Pada intervensi ini, hukum dan kebijakan digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi intervensi kesehatan lainnya (Gostin & Wiley, 2016) seperti:

- a. Memastikan akses terhadap pendidikan kesehatan, kesempatan ekonomi, makanan yang sehat, dan perumahan yang sehat;
- b. Memfasilitasi pemilihan perilaku yang lebih sehat;
- c. Mengurasi polusi lingkungan; dan
- d. Menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan.

Disamping sebagai alat untuk intervensi, “hukum” juga merupakan salah satu faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan, baik yang bersifat positif maupun negatif, misalnya:

1. Tindakan kriminalisasi pada upaya untuk menularkan penyakit secara sengaja, pada upaya melarang penyaluran jarum suntik steril di kalangan pengguna narkoba, dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat;
2. Tindakan diskriminatif terhadap status kesehatan seseorang (mis: HIV/Aids) dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat;

Dengan demikian hukum dapat secara positif memberdayakan dan menghasilkan inovasi dalam menghadapi masalah-masalah kesehatan.

### ***Produk Hukum Kesehatan Masyarakat***

Produk hukum kesehatan masyarakat pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu Perundang-undangan dan Peraturan tingkat menteri. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi presiden (Inpres) dan lain-lain. Kebijakan di tingkat menteri berlaku pada lingkup kementerian yang diaturnya, contohnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes). Permenkes umumnya mengatur kebijakan yang bersifat umum dan berlaku secara terus menerus, sedangkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) umumnya bersifat individu, kongkret, dan berlaku sekali selesai.

Produk hukum kesehatan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga menurut kelahiran undang-undang kesehatan, yaitu: 1) produk hukum yang ada sebelum diterbitkan UU No.23 tahun 1992; 2) produk hukum yang ada antara terbitnya UU No.23 tahun 1992 sampai dengan UU No.36 tahun 2009; dan 3) produk hukum yang terbit setelah UU No.36 tahun 2009. Seperti diketahui terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara UU kesehatan lama (No.23/1992) dengan yang baru (No.36/2009), misalnya pada pengaturan tentang tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, pengawasan upaya kesehatan, serta ketentuan pidana.

Seluruh produk hukum kesehatan harus sejalan dan mengacu kepada UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, sehingga produk hukum kesehatan di Indonesia mengatur hal-hal yang secara umum diatur dalam UU kesehatan tersebut, antara lain:

1. Pembangunan kesehatan
2. Hak dan kewajiban orang dalam kesehatan;
3. Tanggung jawab pemerintah
4. Sumberdaya bidang kesehatan
  - a. Tenaga kesehatan
  - b. Fasilitas pelayanan kesehatan
  - c. Perbekalan kesehatan
  - d. Teknologi dan produk teknologi
5. Upaya kesehatan
  - a. Umum
  - b. Pelayanan kesehatan
    - Pemberian pelayanan
    - Perlindungan pasien
  - c. Pelayanan kesehatan tradisional

- d. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit
  - e. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
  - f. Kesehatan reproduksi
  - g. Keluarga berencana
  - h. Kesehatan sekolah
  - i. Kesehatan olahraga
  - j. Pelayanan kesehatan pada bencana
  - k. Pelayanan darah
  - l. Kesehatan Gigi dan Mulut
  - m. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran
  - n. Kesehatan matra
  - o. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
  - p. Pengamanan makanan dan minuman
  - q. Pengamanan zat adiktif
  - r. Bedah mayat
6. Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat (kelompok rentan kesehatan)
    - a. Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak
    - b. Kesehatan remaja
    - c. Kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat
  7. Gizi
  8. Kesehatan Jiwa
  9. Penyakit Menular dan Tidak Menular
    - a. Penyakit Menular
    - b. Penyakit Tidak Menular
  10. Kesehatan Lingkungan
  11. Kesehatan Kerja
  12. Pengelolaan kesehatan
  13. Informasi kesehatan
  14. Pembiayaan kesehatan
  15. Peran serta masyarakat (pemberdayaan masyarakat)
  16. Badan Pertimbangan Kesehatan
  17. Pembinaan dan Pengawasan
  18. Penyidikan
  19. Ketentuan Pidana
  20. Ketentuan Peralihan

## KEPUSTAKAAN

- Barrett dan kawan-kawan. 2016. "Preface" dalam Michael J. Selgelid (editor), *Public Health Ethics Analysis volume 3*. Switzerland: Springer Int'l Publishing
- College, Jesus. 2008. "The Importance of Public-health Ethics" dalam *Bulletin of the World Health Organization*, Agustus 2008
- Gostin, Lawrence O. 2002. "Public Health Law, Ethics, and Human Rights" dalam Lawrence O. Gostin (ed), *Public Health and Ethics: A Reader*. California: University of California Press

- Gostin, Lawrence O. dan Lindsay F. Wiley. 2016. *Public Health Law: Power, Duty, Restraint 3rd edition*. California: University of California Press
- Gostin, Lawrence O., F. Ed Thompson, dan Frank P. Grad. 2007. "The Law and The Public's Health: The Foundations" dalam Richard A. Goodman (editor), *Law in Public Health Practice 2nd edition*. Oxford: Oxford University Press
- Jameton, Andrew. 2004. "Information Disclosure, Ethical Issues of" dalam Stephen G. Post, *Encyclopedia of Bioethics 3rd Edition*. New York: MacMillan
- Powers, Madison dan Ruth Faden. 2006. *Social Justice: The Moral Foundations of Public Health and Health Policy*. Oxford University Press
- Public Health Leadership Society. 2002. *Principles of the Ethical Practices of Public Health version 2.2*. PH Leadership Society.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen kesatu, dua, tiga, dan empat)*.
- Schmidt, Harald. 2013. "Should Public Health Ethics Embrace the Right Not to Think About One's Health?", dalam Michael J. Selgelid (Ed.), *Ethics in Public Health and Health Policy: Concept, Methods, Case Studies*. Springers
- Siswati, Sri. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Press
- Thomas, James C. 2002. "A Code of Ethics for Public Health" dalam *American Journal of Public Health* Vol.92 No.7 Juli 2002
- Thompson, Alison K dan Ann Robertson. 2013. "Critical Public Health Ethics: Teaching for Moral Imagination and Discernment" dalam Michael J. Selgelid (Ed.), *Ethics in Public Health and Health Policy: Concept, Methods, Case Studies*. Springers

## LAMPIRAN

### Produk Hukum Perundang-undangan Berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat<sup>5</sup>

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
<b>UNDANG-UNDANG</b>		
1	UU No.419 tahun 1949	Ordonansi Obat Keras
2	UU No.9 tahun 1960 <sup>6</sup>	Pokok-pokok Kesehatan
3	UU No.22 tahun 1961	Perguruan Tinggi
4	UU No.1 tahun 1962	Karantina Laut
5	UU No.2 tahun 1962	Karantina Udara
6	UU No.6 tahun 1962	Wabah
7	UU No.6 tahun 1963 <sup>7</sup>	Tenaga Kesehatan
8	UU No.7 tahun 1963	Farmasi
9	UU No.5 tahun 1964	Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
10	UU No.6 tahun 1967	Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
11	UU No.7 tahun 1967	Veteran RI
12	UU No.11 tahun 1969	Pensiun Pegawai dan Janda/Duda PNS
13	UU No.1 tahun 1970	Keselamatan Kerja
14	UU No.1 tahun 1974	Perkawinan
15	UU No.5 tahun 1974	Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
16	UU No.8 tahun 1974	Pokok-pokok Kepegawaian
17	UU No.8 tahun 1976	Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961
18	UU No.22 tahun 1983	Masyarakat Veteriner
19	UU No.4 tahun 1984	Wabah Penyakit Menular
20	UU No.5 tahun 1984	Perindustrian
21	UU No.7 tahun 1984	Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimasi terhadap Wanita
22	UU No.9 tahun 1985	Perikanan
23	UU No.17 tahun 1986	Kewenangan Pengaturan, Pengembangan, dan Pembinaan Industri
24	UU No.2 tahun 1992	Usaha Perasuransian
25	UU No.3 tahun 1992	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
26	UU No.9 tahun 1992	Keimigrasian
27	UU No.12 tahun 1992	Sistem Budidaya Tanaman
28	UU No.13 tahun 1992	Perkeretaapian
29	UU No.14 tahun 1992	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
30	UU No.15 tahun 1992	Penerbangan
31	UU No.21 tahun 1992	Pelayaran
32	UU No.23 tahun 1992 <sup>8</sup>	Kesehatan
33	UU No.5 tahun 1994	Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati
34	UU No.7 tahun 1994	Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Pangan Sedunia
35	UU No.10 tahun 1995	Kepabeaan
36	UU No.7 tahun 1996	Pangan
37	UU No.8 tahun 1996	Pengesahan Convention on Psychotropics Substances 1971
38	UU No.32 tahun 1996 <sup>9</sup>	Tenaga Kesehatan
39	UU No.5 tahun 1997	Psikotropika

<sup>5</sup> Dikumpulkan dari website resmi Kementerian Sekretariat Negara, dan sumber lainnya

<sup>6</sup> Diganti UU No.23 tahun 1992

<sup>7</sup> Diganti UU No.32 tahun 1996

<sup>8</sup> Diganti UU No.36 tahun 2009

<sup>9</sup> Diganti UU No.36 tahun 2014



NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
40	UU No.7 tahun 1997	Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Napza 1988
41	UU No.10 tahun 1997	Ketenaganukliran
42	UU No.23 tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
43	UU No.6 tahun 1998	Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya
44	UU No.72 tahun 1998	Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alkes
45	UU No.8 tahun 1999	Perlindungan Konsumen
46	UU No.22 tahun 1999 <sup>10</sup>	Pemerintahan Daerah
47	UU No.25 tahun 1999	Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
48	UU No.29 tahun 1999	Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
49	UU No.37 tahun 1999	Hubungan Luar Negeri
50	UU No.39 tahun 1999	Hak Asasi Manusia
51	UU No.24 tahun 2000	Perjanjian Internasional
52	UU No.25 tahun 2000	Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
53	UU No.14 tahun 2001	Paten
54	UU No.16 tahun 2001	Yayasan
55	UU No.18 tahun 2002	Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
56	UU No.23 tahun 2002 <sup>11</sup>	Perlindungan Anak
57	UU No.32 tahun 2002	Penyiaran
58	UU No.13 tahun 2003	Ketenagakerjaan
59	UU No.15 tahun 2003	Penetapan Perpu No.1/2002 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
60	UU No.17 tahun 2003	Keuangan Negara
61	UU No.19 tahun 2003	Badan Usaha Milik Negara
62	UU No.20 tahun 2003	Sistem Pendidikan Nasional
63	UU No.1 tahun 2004	Perbendaharaan Negara
64	UU No.7 tahun 2004	Sumber Daya Air
65	UU No.15 tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
66	UU No.23 tahun 2004	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
67	UU No.27 tahun 2004	Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
68	UU No.29 tahun 2004 <sup>12</sup>	Praktik Kedokteran
69	UU No.32 tahun 2004 <sup>13</sup>	Pemerintahan Daerah
70	UU No.33 tahun 2004	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
71	UU No.39 tahun 2004	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
72	UU No.40 tahun 2004	Sistem Jaminan Sosial Nasional
73	UU No.11 tahun 2005	Pengesahan Konvensi Internasional ttg Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
74	UU No.12 tahun 2005	Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
75	UU No.12 tahun 2006	Kewarganegaraan RI
76	UU No.23 tahun 2006	Administrasi Kependudukan
77	UU No.17 tahun 2007	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
78	UU No.24 tahun 2007	Penanggulangan Bencana

<sup>10</sup> Diganti UU No.32 tahun 2004

<sup>11</sup> Diganti UU No.35 tahun 2014 (pertama), Perpu No.1 tahun 2016 (kedua)

<sup>12</sup> Diganti UU No.20 tahun 2013

<sup>13</sup> Diganti Perpu No.3 tahun 2005

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
79	UU No.9 tahun 2008	Penggunaan Bahan Kima dan Larangan PBK sebagai Senjata Kimia
80	UU No.11 tahun 2008 <sup>14</sup>	Informasi dan Transaksi Elektronik
81	UU No.13 tahun 2008	Penyelenggaraan Ibadah Haji
82	UU No.14 tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
83	UU No.37 tahun 2008	Ombudsman RI
84	UU No.11 tahun 2009	Kesejahteraan Sosial
85	UU No.22 tahun 2009	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
86	UU No.25 tahun 2009	Pelayanan Publik
87	UU No.32 tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
88	UU No.35 tahun 2009	Narkotika
89	UU No.36 tahun 2009	Kesehatan
90	UU No.43 tahun 2009	Kearsipan
91	UU No.44 tahun 2009	Rumah Sakit
92	UU No.52 tahun 2009	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
93	UU No.54 tahun 2010	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
94	UU No.12 tahun 2011	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
95	UU No.24 tahun 2011	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
96	UU No.12 tahun 2012	Pendidikan Tinggi
97	UU No.18 tahun 2012	Pangan
98	UU No.17 tahun 2013	Organisasi Kemasyarakatan
99	UU No.20 tahun 2013	Pendidikan Kedokteran
100	UU No.3 tahun 2014	Perindustrian
101	UU No.5 tahun 2014	Aparatur Sipil Negara
102	UU No.6 tahun 2014	Desa
103	UU No.18 tahun 2014	Kesehatan Jiwa
104	UU No.20 tahun 2014	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
105	UU No.23 tahun 2014 <sup>15</sup>	Pemerintahan Daerah
106	UU No.29 tahun 2014 <sup>16</sup>	Pencarian dan Pertolongan
107	UU No.35 tahun 2014	Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
108	UU No.36 tahun 2014	Tenaga Kesehatan
109	UU No.38 tahun 2014	Keperawatan
110	UU No.40 tahun 2014	Perasuransian
111	UU No.9 tahun 2015	Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
112	UU No.8 tahun 2016	Penyandang Disabilitas
113	UU No.15 tahun 2016	Konvensi ILO 2006
114	UU No.16 tahun 2016	Konvensi Perubahan Iklim
115	UU No.19 tahun 2016	Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UU (PERPU)</b>		
1	PERPU No.3 tahun 2005	Perubahan atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2	PERPU No.1 tahun 2016	Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
<b>PERATURAN PEMERINTAH (PP)</b>		
1	PP No.18 tahun 1980	Transfusi Darah
2	PP No.18 tahun 1981	Bedah Mayat Klinis dan Anatomis
3	PP No.25 tahun 1981	Asuransi Sosial PNS

<sup>14</sup> Diganti UU No.19 tahun 2016

<sup>15</sup> Diganti UU No.9 tahun 2015

<sup>16</sup> Menggantikan PP No.12 tahun 2000

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
4	PP No.1 tahun 1988	Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi
5	PP No.40 tahun 1991	Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
6	PP No.67 tahun 1991	Asuransi Sosial ABRI
7	PP No.69 tahun 1991	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun Sipil dan TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Anggota Keluarganya
8	PP No.14 tahun 1993	Penyelenggaraan Program Jamsostek beserta Perubahannya
9	PP No.22 tahun 1993	Daftar Jenis Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja
10	PP No.32 tahun 1996	Tenaga Kesehatan
11	PP No.72 tahun 1998	Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
12	PP No.18 tahun 1999 <sup>17</sup>	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
13	PP No.27 tahun 1999	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
14	PP No.31 tahun 1999	Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
15	PP No.32 tahun 1999 <sup>18</sup>	Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Masyarakat
16	PP No.41 tahun 1999	Pengendalian Pencemaran Udara
17	PP No.51 tahun 1999	Penyelenggaraan Statistik
18	PP No.69 tahun 1999	Label dan Iklan Pangan
19	PP No.81 tahun 1999 <sup>19</sup>	Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
20	PP No.85 tahun 1999 <sup>20</sup>	Perubahan Atas PP No.18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
21	PP No.87 tahun 1999	Tata Cara Penyerahan dan Pemusnakan Dokumen Perusahaan
22	PP No.12 tahun 2000	Pencarian dan Pertolongan
23	PP No.25 tahun 2000	Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
24	PP No.38 tahun 2000 <sup>21</sup>	Perubahan atas PP No.81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
25	PP No.58 tahun 2000	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma
26	PP No.63 tahun 2000	Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
27	PP No.64 tahun 2000	Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
28	PP No.82 tahun 2000	Karantina Hewan
29	PP No.97 tahun 2000 <sup>22</sup>	Formasi PNS
30	PP No.98 tahun 2000 <sup>23</sup>	Pengadaan PNS
31	PP No.99 tahun 2000 <sup>24</sup>	Kenaikan Pangkat PNS
32	PP No.100 tahun 2000	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
33	PP No.101 tahun 2000	Pendidikan dan Latihan Jabatan PNS
34	PP No.102 tahun 2000	Standardisasi Nasional
35	PP No.116 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Dr. Cipto Mangunkusumo
36	PP No.117 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Fatmawati Jakarta
37	PP No.118 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Persahabatan Jakarta
38	PP No.119 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Dr. Hasan Sadikin Bandung

<sup>17</sup> Diganti PP No.85 tahun 1999

<sup>18</sup> Diganti PP No.28 tahun 2006

<sup>19</sup> Diganti PP No.38 tahun 2000

<sup>20</sup> Diganti PP No.74 tahun 2001

<sup>21</sup> Diganti PP No.19 tahun 2003

<sup>22</sup> Diganti PP N.54 tahun 2003

<sup>23</sup> Diganti PP No.11 tahun 2002

<sup>24</sup> Diganti PP No.12 tahun 2002

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
39	PP No.120 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Kariadi Semarang
40	PP No.121 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Dr. Sardjito Yogyakarta
41	PP No.122 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Dr. Mohammad Hoesin Palembang
42	PP No.123 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Dr. M. Djamil Padang
43	PP No.124 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Sanglah Denpasar
44	PP No.125 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
45	PP No.126 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
46	PP No.127 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta
47	PP No.128 tahun 2000	Pendirian Perjan RS Kanker Dharmais Jakarta
48	PP No.134 tahun 2000 <sup>25</sup>	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
49	PP No.3 tahun 2001	Keamanan dan Keselamatan Penerbang
50	PP No.10 tahun 2001	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma
51	PP No.17 tahun 2001	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPOM
52	PP No.19 tahun 2001	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farma
53	PP No.39 tahun 2001	Penyelenggaraan Dekonsentrasi
54	PP No.43 tahun 2001	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial
55	PP No.48 tahun 2001	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
56	PP No.54 tahun 2001	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
57	PP No.52 tahun 2001	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
58	PP No.57 tahun 2001	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
59	PP No.58 tahun 2001	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
60	PP No.59 tahun 2001	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
61	PP No.66 tahun 2001	Retribusi Daerah
62	PP No.74 tahun 2001	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
63	PP No.82 tahun 2001	Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air
64	PP No.11 tahun 2002	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
65	PP No.12 tahun 2002	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
66	PP No.14 tahun 2002	Karantina Tumbuhan
67	PP No.26 tahun 2002	Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
68	PP No.27 tahun 2002	Pengelolaan Limbah Radioaktif
69	PP No.28 tahun 2002	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
70	PP No.56 tahun 2002	Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Indonesia Farma Tbk
71	PP No.63 tahun 2002	Hutan Kota
72	PP No.68 tahun 2002	Ketahanan Pangan

<sup>25</sup> Diganti PP No.48 tahun 2001

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
73	PP No.8 tahun 2003	Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
74	PP No.9 tahun 2003	Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
75	PP No.19 tahun 2003	Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (mengganti PP No.38 tahun 2000)
76	PP No.28 tahun 2003	Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun
77	PP No.54 tahun 2003	Perubahan atas PP No.97 tahun 2000 tentang Formasi PNS
78	PP No.22 tahun 2004	Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jamsostek
79	PP No.23 tahun 2004 <sup>26</sup>	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
80	PP No.28 tahun 2004	Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
81	PP No.43 tahun 2004	Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia
82	PP No.7 tahun 2005	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009
83	PP No.16 tahun 2005	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
84	PP No.19 tahun 2005 <sup>27</sup>	Standar Nasional Pendidikan
85	PP No.21 tahun 2005	Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
86	PP No.23 tahun 2005	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
87	PP No.58 tahun 2005	Pengelolaan Keuangan Daerah
88	PP No.65 tahun 2005	Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
89	PP No.72 tahun 2005	Desa
90	PP No.73 tahun 2005 <sup>28</sup>	Kelurahan
91	PP No.9 tahun 2006 <sup>29</sup>	Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
92	PP No.28 tahun 2006	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
93	PP No.94 tahun 2006	Perubahan atas PP No.9 tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
94	PP No.4 tahun 2007	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan
95	PP No.33 tahun 2007	Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
96	PP No.37 tahun 2007 <sup>30</sup>	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
97	PP No.38 tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
98	PP No.54 tahun 2007	Pelaksanaan Pengangkatan Anak
99	PP No.76 tahun 2007	Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
100	PP No.6 tahun 2008	Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
101	PP No.19 tahun 2008	Kecamatan
102	PP No.21 tahun 2008	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
103	PP No.22 tahun 2008	Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

<sup>26</sup> Diganti PP No.10 tahun 2018

<sup>27</sup> Diganti PP No.32 tahun 2013 (pertama) dan PP No.13 tahun 2005 (kedua)

<sup>28</sup> Diganti UU No.6 tahun 2014

<sup>29</sup> Diganti PP No.94 tahun 2006

<sup>30</sup> Diganti PP No.102 tahun 2012

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
104	PP No.29 tahun 2008	Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
105	PP No.39 tahun 2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
106	PP No.42 tahun 2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
107	PP No.43 tahun 2008	Air Tanah
108	PP No.63 tahun 2008 <sup>31</sup>	Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
109	PP No.1 tahun 2009	Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
110	PP No.13 tahun 2009	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
111	PP No.37 tahun 2009 <sup>32</sup>	Dosen
112	PP No.46 tahun 2009	Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
113	PP No.51 tahun 2009	Pekerjaan Kefarmasian
114	PP No.14 tahun 2010	Pendidikan Kedinasan
115	PP No.17 tahun 2010 <sup>33</sup>	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
116	PP No.24 tahun 2010 <sup>34</sup>	Penggunaan Kawasan Hutan
117	PP No.44 tahun 2010	Prekursor
118	PP No.61 tahun 2010	Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
119	PP No.66 tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
120	PP No.84 tahun 2010	Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
121	PP No.7 tahun 2011	Pelayanan Darah
122	PP No.25 tahun 2011	Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
123	PP No.28 tahun 2011	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
124	PP No.38 tahun 2011	Sungai
125	PP No.40 tahun 2011	Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
126	PP No.27 tahun 2012	Izin Lingkungan
127	PP No.33 tahun 2012	Pemberian ASI Eksklusif
128	PP No.37 tahun 2012	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
129	PP No.39 tahun 2012	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
130	PP No.40 tahun 2012	Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara
131	PP No.41 tahun 2012	Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
132	PP No.50 tahun 2012	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
133	PP No.53 tahun 2012	Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
134	PP No.54 tahun 2012	Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir
135	PP No.81 tahun 2012	Pengeioloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
136	PP No.95 tahun 2012	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

<sup>31</sup> Diganti PP No.2 tahun 2013

<sup>32</sup> Diganti UU No.

<sup>33</sup> Diganti PP No.66 tahun 2010

<sup>34</sup> Diganti PP No.105 tahun 2015



NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
137	PP No.96 tahun 2012	Pelaksanaan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
138	PP No.97 tahun 2012	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
139	PP No.99 tahun 2012	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
140	PP No.101 tahun 2012 <sup>35</sup>	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
141	PP No.102 tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
142	PP No.109 tahun 2012	Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
143	PP No.2 tahun 2013	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
144	PP No.20 tahun 2013	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
145	PP No.21 tahun 2013	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
146	PP No.32 tahun 2013	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
147	PP No.40 tahun 2013	Pelaksanaan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
148	PP No.49 tahun 2013	Badan Pengawas Rumah Sakit
149	PP No.61 tahun 2013	Pengelolaan Limbah Radioaktif
150	PP No.73 tahun 2013	Rawa
151	PP No.82 tahun 2013	Modal Awal untuk BPJS Kesehatan
152	PP No.83 tahun 2013	Modal Awal untuk BPJS Ketenagakerjaan
153	PP No.84 tahun 2013	Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
154	PP No.85 tahun 2013	Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS
155	PP No.86 tahun 2013	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
156	PP No.87 tahun 2013 <sup>36</sup>	Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
157	PP No.88 tahun 2013	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
158	PP No.99 tahun 2013	Pengelolaan Aset Jamsostek
159	PP No.2 tahun 2014	Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
160	PP No.4 tahun 2014	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
161	PP No.43 tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
162	PP No.46 tahun 2014	Sistem Informasi Kesehatan
163	PP No.47 tahun 2014	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
164	PP No.61 tahun 2014	Kesehatan Reproduksi
165	PP No.66 tahun 2014	Kesehatan Lingkungan
166	PP No.69 tahun 2014	Hak Guna Air
167	PP No.87 tahun 2014	Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga

<sup>35</sup> Diganti PP No.76 tahun 2015

<sup>36</sup> Diganti PP No.84 tahun 2015

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
168	PP No.101 tahun 2014	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
169	PP No.103 tahun 2014	Pelayanan Kesehatan Tradisional
170	PP No.13 tahun 2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
171	PP No.17 tahun 2015	Ketahanan Pangan dan Gizi
172	PP No.44 tahun 2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
173	PP No.45 tahun 2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
174	PP No.46 tahun 2015 <sup>37</sup>	Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
175	PP No.58 tahun 2015	Keselamatan Radiasi dan Kealaman dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
176	PP No.60 tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
177	PP No.70 tahun 2015	Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
178	PP No.76 tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
179	PP No.84 tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
180	PP No.93 tahun 2015	Rumah Sakit Pendidikan
181	PP No.105 tahun 2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
182	PP No.108 tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
183	PP No.121 tahun 2015	Pengusahaan Sumber Daya Air
184	PP No.122 tahun 2015	Sistem Penyediaan Air Minum
185	PP No.124 tahun 2015	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
186	PP No.47 tahun 2016	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
187	PP No.58 tahun 2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
188	PP No.59 tahun 2016	Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing
189	PP No.71 tahun 2016	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
190	PP No.37 tahun 2017	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
191	PP No.45 tahun 2017	Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
192	PP No.52 tahun 2017	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
193	PP No.2 tahun 2018	Standar Pelayanan Minimal
194	PP No.10 tahun 2018	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
195		
<b>PERATURAN PRESIDEN (Perpres)</b>		
1	Perpres No.8 tahun 2005	Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
2	Perpres No.16 tahun 2005	Dewan Riset Nasional

<sup>37</sup> Diganti PP No.60 tahun 2015



NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
3	Perpres No.21 tahun 2005	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
4	Perpres No.25 tahun 2005	Tim Dokter Kepresidenan
5	Perpres No.54 tahun 2005	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
6	Perpres No.65 tahun 2005	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
7	Perpres No.47 tahun 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis
8	Perpres No.75 tahun 2006 <sup>38</sup>	Komisi Penanggulangan Aids Nasional
9	Perpres No.83 tahun 2006	Dewan Ketahanan Pangan
10	Perpres No.3 tahun 2007	Perubahan Atas Perpres No.83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
11	Perpres No.94 tahun 2007	Pengendalian Dan Pengawasan Atas Pengadaan Dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik Dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat
12	Perpres No.8 tahun 2008	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
13	Perpres No.46 tahun 2008	Dewan Nasional perubahan Iklim
14	Perpres No.10 tahun 2009	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
15	Perpres No.44 tahun 2009	Tim Dokter Kepresidenan
16	Perpres No.15 tahun 2010	Percepatan Penanggulangan kemiskinan
17	Perpres No.23 tahun 2010	Badan Narkotika Nasional
18	Perpres No.39 tahun 2010	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
19	Perpres No.62 tahun 2010	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
20	Perpres No.88 tahun 2010	Aminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Hakim Agung Mahkamah Agung
21	Perpres No.30 tahun 2011	Pengendalian Zoonosis
22	Perpres No.31 tahun 2011	Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
23	Perpres No.64 tahun 2011	Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologis Calon Tenaga Kerja Indonesia
24	Perpres No.2 tahun 2012	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
25	Perpres No.8 tahun 2012	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
26	Perpres No.72 tahun 2012	Sistem Kesehatan Nasional
27	Perpres No.73 tahun 2012	Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
28	Perpres No.74 tahun 2012	Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
29	Perpres No.121 tahun 2012	Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
30	Perpres No.122 tahun 2012	Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
31	Perpres No.12 tahun 2013 <sup>39</sup>	Jaminan Kesehatan
32	Perpres No.42 tahun 2013	Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
33	Perpres No.46 tahun 2013	Badan Tenaga Nuklir Nasional
34	Perpres No.48 tahun 2013	Budidaya Hewan Peliharaan
35	Perpres No.60 tahun 2013	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
36	Perpres No.74 tahun 2013	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
37	Perpres No.76 tahun 2013	Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik
38	Perpres No.108 tahun 2013	Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
39	Perpres No.109 tahun 2013	Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

<sup>38</sup> Diganti Perpres No.124 tahun 2016

<sup>39</sup> Diganti Perpres No.111 tahun 2013

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
40	Perpres No.110 tahun 2013	Gaji/Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
41	Perpres No.111 tahun 2013	Perubahan atas Perpres No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
42	Perpres No.16 tahun 2014	Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
43	Perpres No.32 tahun 2014	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
44	Perpres No.36 tahun 2014 <sup>40</sup>	Dokter Kepresidenan
45	Perpres No.83 tahun 2014	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
46	Perpres No.97 tahun 2014	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap
47	Perpres No.153 tahun 2014	Grand Design Pembangunan Kependudukan
48	Perpres No.185 tahun 2014	Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
49	Perpres No.186 tahun 2014	Pembedayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil
50	Perpres No.35 tahun 2015	Kementerian Kesehatan
51	Perpres No.77 tahun 2015	Pedoman Organisasi Rumah Sakit
52	Perpres No.131 tahun 2015	Penetapan Daerah tertinggal tahun 2015-2019
53	Perpres No.1 tahun 2016	Badan Restorasi Gambut
54	Perpres No.61 tahun 2016	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
55	Perpres No.83 tahun 2016	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
56	Perpres No.90 tahun 2016	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
57	Perpres No.116 tahun 2016	Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
58	Perpres No.124 tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional
59	Perpres No.125 tahun 2016	Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
60	Perpres No.4 tahun 2017	Wajib Kerja Dokter Spesialis
61	Perpres No.10 tahun 2017	Dewan Sumber Daya Air
62	Perpres No.97 tahun 2017	Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
63	Perpres No.99 tahun 2017	Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
64	Perpres No.4 tahun 2018	Badan Standardisasi Nasional
65	Perpres No.18 tahun 2018	Perubahan atas Perpres No.36 tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan
<b>KEPUTUSAN PRESIDEN (Kepres)</b>		
1	Kepres No.44 tahun 1974	Pokok-pokok Organisasi Departemen
2	Kepres No.56 tahun 1974 <sup>41</sup>	Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-luran yang dipungut Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
3	Kepres No.8 tahun 1977	Perubahan dan Tambahan atas Kepres RI No 56 tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-luran yang

<sup>40</sup> Diganti Perpres No.18 tahun 2018

<sup>41</sup> Diganti Kepres No.8 tahun 1977

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
		dipungut Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
4	Kepres No.37 tahun 1991	Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti
5	Kepres No.12 tahun 1994	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
6	Kepres No.23 tahun 1994	Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap
7	Kepres No.56 tahun 1995	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
8	Kepres No.94 tahun 1999	Dewan Riset Nasional
9	Kepres No.105 tahun 1999 <sup>42</sup>	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
10	Kepres No.106 tahun 1999	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
11	Kepres No.111 tahun 1999	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Adat Terpencil
12	Kepres No.116 tahun 1999	Badan Koordinasi Narkotika Nasional
13	Kepres No.10 tahun 2000	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
14	Kepres No.20 tahun 2000	Badan Koordinasi Keluarga Berencana
15	Kepres No.100 tahun 2000	Tunjangan Tenaga Kesehatan
16	Kepres No.3 tahun 2001	Badan Koordinasi Nasional Penggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
17	Kepres No.12 tahun 2001	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
18	Kepres No.40 tahun 2001	Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
19	Kepres No.41 tahun 2001	Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan
20	Kepres No.48 tahun 2001	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM
21	Kepres No.69 tahun 2001	Komite Nasional Agenda Habitat II
22	Kepres No.78 tahun 2001	Komite Akreditasi Nasional
23	Kepres No.79 tahun 2001	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
24	Kepres No.106 tahun 2001	Pengerahan Convention on Nuclear Safety (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir)
25	Kepres No.123 tahun 2001	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air
26	Kepres No.124 tahun 2001 <sup>43</sup>	Komite Penanggulangan Kemiskinan
27	Kepres No.132 tahun 2001	Dewan Ketahanan Nasional
28	Kepres No.8 tahun 2002	Perubahan atas Kepres No.124 tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
29	Kepres No.17 tahun 2002	Badan Narkotika Nasional
30	Kepres No.20 tahun 2002 <sup>44</sup>	Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional
31	Kepres No.59 tahun 2002	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
32	Kepres No.87 tahun 2002	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
33	Kepres No.77 tahun 2003	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
34	Kepres No.101 tahun 2003	Perubahan atas Kepres No.20/2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional
35	Kepres No.41 tahun 2004	Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang ada di Kawasan Hutan
36	Kepres No.52 tahun 2004	Komisi Nasional Lanjut Usia
37	Kepres No.82 tahun 2004	Tim Dokter Kepresidenan
38	Kepres No.83 tahun 2004	Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Antiretroviral
39	Kepres No.88 tahun 2004	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
40	Kepres No.3 tahun 2007	Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi
41	Kepres No.16 tahun 2007	Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi

<sup>42</sup> Diganti Perpres No.2 tahun 2012

<sup>43</sup> Diganti Kepres No.8 tahun 2002

<sup>44</sup> Diganti Kepres No.101 tahun 2003

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
42	Kepres No.24 tahun 2008	Hari Menanam Pohon Indonesia
43	Kepres No.6 tahun 2009	Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional
44	Kepres No.22 tahun 2009	Hari Konversi Alam Nasional
45	Kepres No.12 tahun 2012	Penetapan Wilayah Sungai
46	Kepres No.35 tahun 2012	Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme
47	Kepres No.43 tahun 201	Keanggotaan Dewan Sumber daya Air Nasional
<b>INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)</b>		
1	Inpres No.9 tahun 2000	Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
2	Inpres No.3 tahun 2002	Penanggulangan Penyalahgunaan Napza
3	Inpres No.1 tahun 2007	Penanganan Avian Influenza
4	Inpres No.1 tahun 2010	Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010
5	Inpres No.17 tahun 2011	Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
6	Inpres No.6 tahun 2016	Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

**Tabel 4. Produk Hukum Peraturan Tingkat Menteri Berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat**

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
<b>KEMENTERIAN KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKOKESRA)</b>		
1	Kepmenko Kesra No.9 tahun 1994	Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia
2	Permenko Kesra No.2 tahun 2013	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
<b>PERATURAN/SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KEMENTERIAN</b>		
1	SKB Menaker dan Menkes No.235/1985/Naker dan 114/1985/Kes	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja
2	SKB Menkes dan Menhankam No.1122/1999/Kes dan No.01/1999/Hankam	Kerjasama Pembinaan Kesehatan Dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara
3	PB Menkes dan Ka BATAN No.171/2008/Kes	Pemanfaatan Tenaga Nuklir
4	PB Menkes dan Kasad No.590/2008/Kes	Kerjasama Bidang Kesehatan Kemenkes dan TNI Angkatan Darat
5	PB Menkes dan Mendagri No.138/2009/Kes dan 12/2009/Dagri	Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah
<b>PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES)</b>		
1	Permenkes No.159b tahun 1988	Rumah Sakit
2	Permenkes No.339 tahun 1989 <sup>45</sup>	Tukang Gigi
3	Permenkes No.560 tahun 1989	Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya, dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya
4	Permenkes No.749a tahun 1989	Rekam Medis/Medical Report
5	Permenkes No.916 tahun 1997	Izin Praktik Bagi Tenaga Medis
6	Permenkes No.867 tahun 2004	Registrasi dan Praktik Terapis Wicara
7	Permenkes No.949 tahun 2004	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB

<sup>45</sup> Telah dicabut dengan Permenkes No.1871 tahun 2011

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
8	Permenkes No.988 tahun 2004 <sup>46</sup>	Pencantuman Nama Generik pada Label Obat
9	Permenkes No.1173 tahun 2004	Rumah Sakit Gigi dan Mulut
10	Permenkes No.1192 tahun 2004	Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan
11	Permenkes No.1199 tahun 2004	Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja
12	Permenkes No.1205 tahun 2004	Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)
13	Permenkes No.168 tahun 2005	Prekursor Farmasi
14	Permenkes No.524 tahun 2005	Perubahan atas Permenkes No.988 tahun 2004 tentang Pencantuman Nama Generik pada Label Obat
15	Permenkes No.1575 tahun 2005	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
16	Permenkes No.357 tahun 2006	Registrasi dan Izin Kerja Radiografer
17	Permenkes No.426 tahun 2006	Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan
18	Permenkes No.558 tahun 2006	Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan
19	Permenkes No.684 tahun 2006	Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan
20	Permenkes No.284 tahun 2007 <sup>47</sup>	Apotek Rakyat
21	Permenkes No.512 tahun 2007	Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
22	Permenkes No.548 tahun 2007	Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis
23	Permenkes No.949 tahun 2007	Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil
24	Permenkes No.1109 tahun 2007	Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif
25	Permenkes No.1295 tahun 2007	Perubahan pertama atas Permenkes No.1575 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
26	Permenkes No.269 tahun 2008	Rekam Medis
27	Permenkes No.290 tahun 2008	Persetujuan Tindakan Kedokteran
28	Permenkes No.496 tahun 2008	Tata Cara Pengusulan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia
29	Permenkes No 518 tahun 2008 <sup>48</sup>	Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Vertikal
30	Permenkes No.541 tahun 2008	Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Departemen Kesehatan RI
31	Permenkes No.741 tahun 2008	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupatèn/Kota
32	Permenkes No.1010 tahun 2008	Registrasi Obat
33	Permenkes No.1110 tahun 2008	Petunjuk Pelaksanaan Jabfung Bidan dan Angka Kreditnya
34	Permenkes No.1120 tahun 2008	Perubahan atas Permenkes No.1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat
35	Permenkes No.138 tahun 2009	Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Peserta Askes
36	Permenkes No.307 tahun 2009	Program Bantuan Sosial dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
37	Permenkes No.376 tahun 2009	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya
38	Permenkes No.377 tahun 2009	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya

<sup>46</sup> Diganti Permenkes No.524 tahun 2005

<sup>47</sup> Dicabut dengan Permenkes No.53 tahun 2016

<sup>48</sup> Diganti Permenkes No.474 tahun 2009



NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
39	Permenkes No.474 tahun 2009	Perubahan atas PMK No 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Vertikal
40	Permenkes No.510 tahun 2009	Mutasi Kepegawaian dalam Depkes
41	Permenkes No.551 tahun 2009	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya
42	Permenkes No.657 tahun 2009	Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya
43	Permenkes No.658 tahun 2009	Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
44	Permenkes No.659 tahun 2009	Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia
45	Permenkes No.701 tahun 2009	Pangan Iradiasi
46	Permenkes No.833 tahun 2009	Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca
47	Permenkes No.971 tahun 2009	Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan
48	Permenkes No.999 tahun 2009	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Menjamin Kesehatan bagi Menteri dan Pejabat Tertentu
49	Permenkes No.1201 tahun 2009	Petunjuk Pelaksanaan Jabfung Dokter Pendidikan Klinis dan Angka Kreditnya
50	Permenkes No.1244 tahun 2009	Pendelegasian Wewenang dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
51	Permenkes No.1249 tahun 2009	Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir dengan menggunakan Alat PET-CT di Rumah Sakit
52	Permenkes No.3 tahun 2010	Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan
53	Permenkes No.39 tahun 2010	Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Berbantu
54	Permenkes No.147 tahun 2010	Perizinan Rumah Sakit
55	Permenkes No.155 tahun 2010	Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Balita
56	Permenkes No.161 tahun 2010	Registrasi Tenaga Kesehatan
57	Permenkes No.162 tahun 2010	Pelaporan Kematian Dan Penyebab Kematian
58	Permenkes No.299 tahun 2010	Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip
59	Permenkes No.317 tahun 2010	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia
60	Permenkes No.374 tahun 2010	Pengendalian Vektor
61	Permenkes No.411 tahun 2010	Laboratorium Klinik
62	Permenkes No.462 tahun 2010	Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
63	Permenkes No.492 tahun 2010	Persyaratan Kualitas Air Minum
64	Permenkes No.812 tahun 2010	Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Kesehatan
65	Permenkes No.1144 tahun 2010	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
66	Permenkes No.1190 tahun 2010	Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
67	Permenkes No.1464 tahun 2010	Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
68	Permenkes No.1501 tahun 2010	Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Menimbulkan Wabah
69	Permenkes No.1636 tahun 2010	Sunat Perempuan
70	Permenkes No.1787 tahun 2010	Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan
71	Permenkes No.1799 tahun 2010	Industri Farmasi
72	Permenkes No.28 tahun 2011	Klinik
73	Permenkes No.150 tahun 2011	Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
74	Permenkes No.188 tahun 2011	Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
75	Permenkes No.416 tahun 2011	Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes (Persero)
76	Permenkes No.519 tahun 2011	Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di RS

<b>NO</b>	<b>PRODUK HUKUM</b>	<b>TENTANG</b>
77	Permenkes No.755 tahun 2011	Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit
78	Permenkes No.889 tahun 2011	Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
79	Permenkes No.1018 tahun 2011	Strategi Adaptasi Iklim
80	Permenkes No.1031 tahun 2011	Batas Maksimum Cemaran Radioaktif Dalam Pangan
81	Permenkes No.1077 tahun 2011	Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah
82	Permenkes No.1096 tahun 2011	Higiene Sanitasi Jasaboga
83	Permenkes No.1109 tahun 2011	JUKNIS Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia
84	Permenkes No.1148 tahun 2011	Pedagang Besar Farmasi
85	Permenkes No.1691 tahun 2011	Keselamatan Pasien Rumah Sakit
86	Permenkes No.1796 tahun 2011	Registrasi Tenaga Kesehatan
87	Permenkes No.1871 tahun 2011	Pencabutan PMK No. 339 Ttg Tukang Gigi
88	Permenkes No.1893 tahun 2011	Unit Layanan Pengadaan Kementerian Kesehatan
89	Permenkes No.2052 tahun 2011	Izin Praktik Kedokteran
90	Permenkes No.2407 tahun 2011	Pelayanan Kesehatan Haji
91	Permenkes No.2415 tahun 2011	Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika
92	Permenkes No.1 tahun 2012	Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
93	Permenkes No.2 tahun 2012	Tata Laksana BKTm dan LKTM
94	Permenkes No.3 tahun 2012	Standar Mineral Mix
95	Permenkes No.4 tahun 2012	JUKNIS Promosi Kesehatan RS
96	Permenkes No.6 tahun 2012	Industri Dan Usaha Obat Tradisional
97	Permenkes No.7 tahun 2012	Registrasi Obat Tradisional
98	Permenkes No.8 tahun 2012	Kode Etik PNS Di Lingkungan KEMENKES
99	Permenkes No.12 tahun 2012	Akreditasi Rumah Sakit
100	Permenkes No.26 tahun 2012	Pekerjaan Tukang Gigi
101	Permenkes No.27 tahun 2012	Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan
102	Permenkes No.28 tahun 2012	Standar Bubuk Tabur Gizi
103	Permenkes No.29 tahun 2012	Tarif bagi Peserta PT Askes
104	Permenkes No.30 tahun 2012	Jadwal Retensi Arsip Dan Fasilitatif Di KEMENKES
105	Permenkes No.33 tahun 2012	Bahan Tambahan Pangan
106	Permenkes No.34 tahun 2012	Batas Maksimum Melamin Dalam Pangan
107	Permenkes No.35 tahun 2012	Pedoman Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan
108	Permenkes No.36 tahun 2012	Rahasia Kedokteran
109	Permenkes No.37 tahun 2012	Penyelenggaraan Laboratorium PUSKESMAS
110	Permenkes No.39 tahun 2012	JUKLAK Penyelesaian Kerugian Negara Di KEMENKES
111	Permenkes No.40 tahun 2012	Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS
112	Permenkes No.41 tahun 2012	Tunjangan Profesi bagi Dosen Politeknik KEMENKES
113	Permenkes No.42 tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No.2407/MENKES/SK/XII/2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Haji
114	Permenkes No.43 tahun 2012	Izin Belajar Bagi PNS Di Lingkungan KEMENKES
115	Permenkes No.46 tahun 2012	JUKNIS Rehab Medis Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika
116	Permenkes No.47 tahun 2012	Pendayagunaan Perawat Ke Luar Negeri
117	Permenkes No.48 tahun 2012	Bank Sel Punca Darah Tali Pusat
118	Permenkes No.49 tahun 2012	Pengaduan Masyarakat Terpadu Di KEMENKES
119	Permenkes No.58 tahun 2012	Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi
120	Permenkes No.1 tahun 2013	Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren
121	Permenkes No.4 tahun 2013	Pedoman Penyusunan RBA BLU Di Lingkungan Ditjen BUK
122	Permenkes No.5 tahun 2013	Pedoman Tata Laksana Malaria
123	Permenkes No.6 tahun 2013	Kriteria FASYANKES Terpencil, Sangat Terpencil Dan Tidak Diminati

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
124	Permenkes No.7 tahun 2013	Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan PTT
125	Permenkes No.9 tahun 2013	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
126	Permenkes No.10 tahun 2013	Impor dan Ekspor Narkotika
127	Permenkes No.12 tahun 2013	Pola Tarif BLU Rumah Sakit
128	Permenkes No.13 tahun 2013	Pengendalian Tuberkolosis Resistan Obat
129	Permenkes No.15 tahun 2013	Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI
130	Permenkes No.21 tahun 2013	Penanggulangan HIV dan AIDS
131	Permenkes No.22 tahun 2013	Pekerjaan Dan Praktik Ortosis Prostetis
132	Permenkes No.23 tahun 2013	Pekerjaan Dan Praktik Okupasi Terapis
133	Permenkes No.28 tahun 2013	Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
134	Permenkes No.29 tahun 2013	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CTKI
135	Permenkes No.30 tahun 2013	Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji
136	Permenkes No.31 tahun 2013	Pekerjaan Perawat Anestesi
137	Permenkes No.32 tahun 2013	Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian
138	Permenkes No.33 tahun 2013	Pemberian ASI Eksklusif
139	Permenkes No.34 tahun 2013	Tindakan Hapus Tikus Dan Hapus Serangga
140	Permenkes No.37 tahun 2013	Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
141	Permenkes No.39 tahun 2013	Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
142	Permenkes No.40 tahun 2013	Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan
143	Permenkes No.46 tahun 2013	Registrasi Tenaga Kesehatan
144	Permenkes No.48 tahun 2013	Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur E-PURCHASING Berdasarkan E-CATALOGUE
145	Permenkes No.53 tahun 2013	Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis / Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
146	Permenkes No.54 tahun 2013	Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan
147	Permenkes No.69 tahun 2013	Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
148	Permenkes No.71 tahun 2013	Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
149	Permenkes No.83 tahun 2013	Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
150	Permenkes No.30 tahun 2014	Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
151	Permenkes No.35 tahun 2014	Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
152	Permenkes No.58 tahun 2014	Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit
153	Permenkes No.59 tahun 2014	Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
154	Permenkes No.37 tahun 2015	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di Luar Negeri
155	Permenkes No.56 tahun 2015	Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan
156	Permenkes No.56 tahun 2015	Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan
157	Permenkes No.64 tahun 2015	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
158	Permenkes No.75 tahun 2015	Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan



NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
159	Permenkes No.82 tahun 2015	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang SARPRAS Kesehatan Tahun Anggaran 2016
160	Permenkes No.2 tahun 2016	Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah
161	Permenkes No.3 tahun 2016	Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Tidakkan Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan
162	Permenkes No.4 tahun 2016	Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
163	Permenkes No.5 tahun 2016	Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (clinical advisory)
164	Permenkes No.6 tahun 2016	Formularium Obat Asli Indonesia
165	Permenkes No.7 tahun 2016	Komisi Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional
166	Permenkes No.8 tahun 2016	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
167	Permenkes No.10 tahun 2016	Komite Penempatan Dokter Spesialis
168	Permenkes No.11 tahun 2016	Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit
169	Permenkes No.12 tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
170	Permenkes No.13 tahun 2016	Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional
171	Permenkes No.14 tahun 2016	Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, Dan Pelayanan Purna Jual
172	Permenkes No.15 tahun 2016	Istithaah Kesehatan Jemaah Haji
173	Permenkes No.17 tahun 2016	Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
174	Permenkes No.18 tahun 2016	Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
175	Permenkes No.19 tahun 2016	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
176	Permenkes No.20 tahun 2016	Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut
177	Permenkes No.21 tahun 2016	Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemda
178	Permenkes No.22 tahun 2016	Pedoman Optimasi Fungsi Otak Pada Pembelajaran Anak Usia Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)
179	Permenkes No.23 tahun 2016	Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat
180	Permenkes No.24 tahun 2016	Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit
181	Permenkes No.25 tahun 2016	Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019
182	Permenkes No.26 tahun 2016	Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
183	Permenkes No.27 tahun 2016	Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
184	Permenkes No.29 tahun 2016	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
185	Permenkes No.31 tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
186	Permenkes No.32 tahun 2016	Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
187	Permenkes No.33 tahun 2016	Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah
188	Permenkes No.34 tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit
189	Permenkes No.35 tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
190	Permenkes No.36 tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
191	Permenkes No.37 tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang SARPRAS Kesehatan Tahun Anggaran 2016
192	Permenkes No.38 tahun 2016	Penyelenggaraan Transplantasi Organ
193	Permenkes No.39 tahun 2016	Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
194	Permenkes No.40 tahun 2016	Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
195	Permenkes No.41 tahun 2016	Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan
196	Permenkes No.43 tahun 2016	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
197	Permenkes No.44 tahun 2016	Pedoman Manajemen Puskesmas
198	Permenkes No.45 tahun 2016	Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
199	Permenkes No.47 tahun 2016	Penyelenggaraan Terapi Buprenorfina
200	Permenkes No.48 tahun 2016	Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran
201	Permenkes No.49 tahun 2016	Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota
202	Permenkes No.50 tahun 2016	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dengan Industri Tembakau Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
203	Permenkes No.51 tahun 2016	Standar Produk Suplementasi Gizi
204	Permenkes No.52 tahun 2016	Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
205	Permenkes No.53 tahun 2016	Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/PER/III/2007 Tentang Apotek Rakyat
206	Permenkes No.56 tahun 2016	Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
207	Permenkes No.58 tahun 2016	Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan
208	Permenkes No.59 tahun 2016	Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
209	Permenkes No.60 tahun 2016	Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Dan Jabatan Fungsional NonKesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
210	Permenkes No.61 tahun 2016	Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
211	Permenkes No.64 tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
212	Permenkes No.67 tahun 2016	Panggulangan Tuberkulosis

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
213	Permenkes No.71 tahun 2016	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017
214	Permenkes No.75 tahun 2016	Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah
215	Permenkes No.76 tahun 2016	Pedoman Indonesian Case Base Group (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
216	Permenkes No.78 tahun 2016	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017
217	Permenkes No.80 tahun 2016	Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan
218	Permenkes No.1 tahun 2017	Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
219	Permenkes No.2 tahun 2017	Perubahan Penggolongan Narkotika
220	Permenkes No.3 tahun 2017	Perubahan Penggolongan Psikotropika
221	Permenkes No.4 tahun 2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
222	Permenkes No.5 tahun 2017	Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019
223	Permenkes No.6 tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan
224	Permenkes No.7 tahun 2017	Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan
225	Permenkes No.8 tahun 2017	Eradikasi Frambusia
226	Permenkes No.9 tahun 2017	Apotek
227	Permenkes No.10 tahun 2017	Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017
228	Permenkes No.11 tahun 2017	Keselamatan Pasien
229	Permenkes No.12 tahun 2017	Penyelenggaraan Imunisasi
230	Permenkes No.13 tahun 2017	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
231	Permenkes No.14 tahun 2017	Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
232	Permenkes No.15 tahun 2017	Penanggulangan Cacingan
233	Permenkes No.16 tahun 2017	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
234	Permenkes No.17 tahun 2017	Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan
235	Permenkes No.18 tahun 2017	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
236	Permenkes No.19 tahun 2017	Pedoman Pendanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
237	Permenkes No.20 tahun 2017	Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik
238	Permenkes No.21 tahun 2017	Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji Di Arab Saudi
239	Permenkes No.22 tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
240	Permenkes No.23 tahun 2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
241	Permenkes No.24 tahun 2017	Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

<b>NO</b>	<b>PRODUK HUKUM</b>	<b>TENTANG</b>
242	Permenkes No.25 tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017
243	Permenkes No.27 tahun 2017	Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
244	Permenkes No.28 tahun 2017	Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
245	Permenkes No.29 tahun 2017	Perubahan Atas Permenkes No.34 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
246	Permenkes No.30 tahun 2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
247	Permenkes No.31 tahun 2017	Tata Hubungan Kerja Penetapan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan
248	Permenkes No.32 tahun 2017	Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum
249	Permenkes No.33 tahun 2017	Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Perencanaan, Pengadaan Berdasarkan Katalog Elektronik Dan Pemakaian Obat
250	Permenkes No.34 tahun 2017	Akreditasi Rumah Sakit
251	Permenkes No.35 tahun 2017	Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
252	Permenkes No.37 tahun 2017	Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi
253	Permenkes No.38 tahun 2017	Tata Hubungan Kerja Penanganan Unjuk Rasa Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
254	Permenkes No.39 tahun 2017	Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Dan Dokter Gigi Indonesia
255	Permenkes No.40 tahun 2017	Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis
256	Permenkes No.41 tahun 2017	Perubahan Penggolongan Narkotika
257	Permenkes No.42 tahun 2017	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian / Inpassing
258	Permenkes No.43 tahun 2017	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan
259	Permenkes No.44 tahun 2017	Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan
260	Permenkes No.45 tahun 2017	Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis
261	Permenkes No.48 tahun 2017	Pedoman Perencanaan dan Penganggaran di Bidang Kesehatan
262	Permenkes No.50 tahun 2017	Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya
263	Permenkes No.52 tahun 2017	Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak
264	Permenkes No.53 tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
265	Permenkes No.54 tahun 2017	Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
266	Permenkes No.56 tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
267	Permenkes No.57 tahun 2017	Perubahan Penggolongan Psikotropika

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
268	Permenkes No.58 tahun 2017	Perubahan Penggolongan Narkotika
269	Permenkes No.60 tahun 2017	Pengawasan Tata Niaga Impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro, Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
270	Permenkes No.62 tahun 2017	Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
<b>KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN (KEPMENKES)</b>		
1	Kepmenkes No.702 tahun 1993	Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti
2	Kepmenkes No.918 tahun 1993	Pedagang Besar Farmasi
3	Kepmenkes No.1244 tahun 1994	Pedoman Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedis
4	Kepmenkes No.633 tahun 2000	Pembentukan Gudang Perbekalan Kesehatan di Bidang Farmasi di Kabupaten/Kota Tertentu
5	Kepmenkes No.647 tahun 2000	Registrasi dan Praktik Perawat
6	Kepmenkes No.850 tahun 2000	Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan
7	Kepmenkes No.951 tahun 2000	Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas
8	Kepmenkes No.1019 tahun 2000	Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi
9	Kepmenkes No.1112 tahun 2000	Komite Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
10	Kepmenkes No.876 tahun 2001	Pedoman Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
11	Kepmenkes No.909 tahun 2001	Pengalihan Kelembagaan Beberapa UPT di Lingkungan Departemen Kesehatan Menjadi Perangkat Daerah
12	Kepmenkes No.1239 tahun 2001	Registrasi dan Praktik Perawat
13	Kepmenkes No.1277 tahun 2001	Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
14	Kepmenkes No.1392 tahun 2001	Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi
15	Kepmenkes No.1363 tahun 2001	Registrasi dan Izin Kerja Fisioterapi
16	Kepmenkes No.4 tahun 2002	Laboratorium Kesehatan Swasta
17	Kepmenkes No.11 tahun 2002	Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium
18	Kepmenkes No.220 tahun 2002	Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
19	Kepmenkes No.544 tahun 2002	Registrasi dan Izin Kerja Refraksi Optisien
20	Kepmenkes No.556 tahun 2002	Perubahan Rumusan Kedudukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan
21	Kepmenkes No.900 tahun 2002	Registrasi dan Praktik Bidan
22	Kepmenkes No.907 tahun 2002	Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
23	Kepmenkes No.913 tahun 2002	Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia
24	Kepmenkes No.996 tahun 2002	Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehab Penyalahgunaan NAPZA
25	Kepmenkes No.1067 tahun 2002	Peningkatan Kesehatan Pesantren
26	Kepmenkes No.1285 tahun 2002	Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual
27	Kepmenkes No.1333 tahun 2002	Persetujuan Penelitian Kesehatan pada Manusia
28	Kepmenkes No. 1335 tahun 2002	Standar Operasional Pengambilan dan Pengukuran Sampel Kualitas Ruang Udara Ruang RS
29	Kepmenkes No.1405 tahun 2002	Persyaratkan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
30	Kepmenkes No.1406 tahun 2002	Standar Pemeriksaan Kadar Timah Hitam pada Spesimen Biomarker Manusia
31	Kepmenkes No.1407 tahun 2002	Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan
32	Kepmenkes No.1424 tahun 2002	Pedoman Penyelenggaraan Optikal
33	Kepmenkes No.1439 tahun 2002	Penggunaan Gas Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan



NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
34	Kepmenkes No.1540 tahun 2002	Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain
35	Kepmenkes No.289 tahun 2003	Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan
36	Kepmenkes No.364 tahun 2003	Laboratorium Kesehatan
37	Kepmenkes No.640 tahun 2003	Teknisi Kardiovaskuler
38	Kepmenkes No.679 tahun 2003	Registrasi dan Izin Kerja Apoteker
39	Kepmenkes No.715 tahun 2003	Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga
40	Kepmenkes No.942 tahun 2003	Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Manakan Jajanan
41	Kepmenkes No.1076 tahun 2003	Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
42	Kepmenkes No.1098 tahun 2003	Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
43	Kepmenkes No.1116 tahun 2003	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
44	Kepmenkes No.1277 tahun 2003	Teknisi Akupunktur
45	Kepmenkes No.1479 tahun 2003	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
46	Kepmenkes No.1538 tahun 2003	Standar Pengelolaan Spesimen Legionella
47	Kepmenkes No.81 tahun 2004	Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit
48	Kepmenkes No.128 tahun 2004	Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
49	Kepmenkes No.949 tahun 2004	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
50	Kepmenkes No.983 tahun 2004	Pedoman Penyelenggaraan Warung Obat Desa
51	Kepmenkes No.1027 tahun 2004	Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
52	Kepmenkes No.1059 tahun 2004	Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi
53	Kepmenkes No.1138 tahun 2004	Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Dan Manggala Karya Bakti Husada
54	Kepmenkes No.1197 tahun 2004	Standar Pelayanan Farmasi Di RS
55	Kepmenkes No.1204 tahun 2004	Persyaratan Kesehatan Lingkungan RS
56	Kepmenkes No.496 tahun 2005	Pedoman Audit Medis Di RS
57	Kepmenkes No.631 tahun 2005	Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Di RS
58	Kepmenkes No.836 tahun 2005	Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan
59	Kepmenkes No.926 tahun 2005	Pedoman Pelaksanaan Pemilihan PNS DEPKES Berprestasi Tingkat Nasional
60	Kepmenkes No.1031 tahun 2005	Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan
61	Kepmenkes No.1347 tahun 2005	Pedoman Pemilihan Dosen Poltekkes Dan Akademi Kesehatan Berprestasi Di Lingkungan DEPKES
62	Kepmenkes No.1389 tahun 2005	Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkolosis
63	Kepmenkes No.1396 tahun 2005	Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada Kepada PNS Di Lingkungan DEPKES
64	Kepmenkes No.1415 tahun 2005	Kebijakan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga
65	Kepmenkes No.1473 tahun 2005	Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan Untuk Mencapai Vision 2020
66	Kepmenkes No.1507 tahun 2005	Pedoman Pelayanan Konseling Dan Testing HIV-AIDS Secar Sukarela (VCT)
67	Kepmenkes No.1508 tahun 2005	Rencana Kerja Jangka Menengah Perawatan, Dukungan Dan Pengobatan Untuk ODHA
68	Kepmenkes No.1534 tahun 2005	Kurikulum Pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan
69	Kepmenkes No.1537 tahun 2005	Kurikulum Pendidikan Diploma IV Fisioterapi
70	Kepmenkes No.1553 tahun 2005	Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Elektromedik
71	Kepmenkes No.1554 tahun 2005	Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
72	Kepmenkes No.1555 tahun 2005	Kurikulum Pendidikan Diploma IV Keperawatan Medikal Bedah Dan Keperawatan GADAR
73	Kepmenkes No.1582 tahun 2005	Pedoman Pengendalian Filariasis (Penyakit Kaki Gajah)
74	Kepmenkes No.1611 tahun 2005	Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi
75	Kepmenkes No.1626 tahun 2005	Pedoman Pemantauan Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
76	Kepmenkes No.1653 tahun 2005	Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan
77	Kepmenkes No.048 tahun 2006	Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Masyarakat Akibat Bencana Dan Konflik
78	Kepmenkes No.068 tahun 2006 <sup>49</sup>	Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik pada Label Obat
79	Kepmenkes No.189 tahun 2006	Kebijakan Obat Nasional
80	Kepmenkes No.239 tahun 2006	Penunjukan Laboratorium Virologi Nasional Polio Dan Laboratorium Virologi Nasional Campak
81	Kepmenkes No.241 tahun 2006	Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pemeriksa HIV Dan Infeksi Oportunistik
82	Kepmenkes No.279 tahun 2006	Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas
83	Kepmenkes No.284 tahun 2006	Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut
84	Kepmenkes No.364 tahun 2006	Pedoman Pengendalian Demam Tifoid
85	Kepmenkes No.424 tahun 2006	Pedoman Pengendalian Cacingan
86	Kepmenkes No.494 tahun 2006	Penetapan Rumah Sakit Dan Satelit Uji Coba Pelayanan Terapi Rumatan Metadon
87	Kepmenkes No.567 tahun 2006	Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA)
88	Kepmenkes No.879 tahun 2006	Rencana Strategi Nasional Untuk Mencapai Sound Hearing 2030
89	Kepmenkes No.1033 tahun 2006	Pedoman Umum Perencanaan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri Bidang Kesehatan
90	Kepmenkes No.1415 tahun 2006	Pola Klasifikasi Arsip Dan Kode Unit Pengolah Di Lingkungan Departemen Kesehatan
91	Kepmenkes No.039 tahun 2007	Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga
92	Kepmenkes No.042 tahun 2007	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria
93	Kepmenkes No.043 tahun 2007	Pedoman Pelatihan Malaria
94	Kepmenkes No.044 tahun 2007	Pedoman Pengobatan Malaria
95	Kepmenkes No.145 tahun 2007	Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan
96	Kepmenkes No.214 tahun 2007	Standar Pelayanan Minimum RS Paru DR.H.A. Rotinsulu Bandung
97	Kepmenkes No.221 tahun 2007	Penyelenggara Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran
98	Kepmenkes No.227 tahun 2007	Standar Pelayanan Minimum RSUP H. Adam Malik Medan
99	Kepmenkes No.275 tahun 2007	Pedoman Surveilans Malaria
100	Kepmenkes No.342 tahun 2007	Pejabat Yang Berwenang Memberikan Informasi Kepada Pers Dan Atau Masyarakat
101	Kepmenkes No.369 tahun 2007	Standar Profesi Bidan
102	Kepmenkes No.370 tahun 2007	Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan
103	Kepmenkes No.371 tahun 2007	Standar Profesi Teknisi Elektromedis
104	Kepmenkes No.372 tahun 2007	Standar Profesi Teknisi Gigi

<sup>49</sup> Diganti Kepmenkes No.314 tahun 2009

<b>NO</b>	<b>PRODUK HUKUM</b>	<b>TENTANG</b>
105	Kepmenkes No.373 tahun 2007	Standar Profesi Sanitarian
106	Kepmenkes No.374 tahun 2007	Standar Profesi Gizi
107	Kepmenkes No.375 tahun 2007	Standar Profesi Radiografer
109	Kepmenkes No.376 tahun 2007	Standar Profesi Fisioterapi
110	Kepmenkes No.377 tahun 2007	Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan
111	Kepmenkes No.378 tahun 2007	Standar Profesi Perawat Gigi
112	Kepmenkes No.423 tahun 2007	Kebijakan Peningkatan Kualitas Dan Akses Pelayanan Darah
113	Kepmenkes No.424 tahun 2007	Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan
114	Kepmenkes No.425 tahun 2007	Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Di Kantor Kesehatan Pelabuhan
115	Kepmenkes No.431 tahun 2007	Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan Di Pelabuhan-Bandara-Pos Lintas Batas
116	Kepmenkes No.432 tahun 2007	Pedoman Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit
117	Kepmenkes No.483 tahun 2007	Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP)
118	Kepmenkes No.509 tahun 2007	Pembentukan Unit Transfusi Darah RSUP H. Adam Malik
119	Kepmenkes No.562 tahun 2007	Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan
120	Kepmenkes No.563 tahun 2007	Keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan Masa Bakti 2007 - 2011
121	Kepmenkes No.585 tahun 2007	Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas
122	Kepmenkes No.588 tahun 2007	Penyelenggaraan Pilot Proyek IPV Di Yogyakarta.
123	Kepmenkes No.671 tahun 2007	Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan
124	Kepmenkes No.893 tahun 2007	Pedoman Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Pengobatan Filariasis
125	Kepmenkes No.895 tahun 2007	Susunan Dan Uraian Jabatan RS Mata Cicendo Bandung
126	Kepmenkes No.938 tahun 2007	Standar Asuhan Kebidanan
127	Kepmenkes No.984 tahun 2007	Penerima Bantuan Alat Kesehatan Baloon Dan Stent
128	Kepmenkes No.1017 tahun 2007	Penunjukan Sarana Pelayanan Kesehatan Sbg Tempat Pengujian Kesehatan
129	Kepmenkes No.1036 tahun 2007	Pemberhentian Dan Pengangkatan Dewan Pengawas RSUP Fatmawati
130	Kepmenkes No.1038 tahun 2007	Panitia Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Th 2007
131	Kepmenkes No.1045 tahun 2007	Penetapan Wilayah Pengesahan Pemberian ICV Bagi Calon Jemaah Haji
132	Kepmenkes No.1046 tahun 2007	Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat
133	Kepmenkes No.1103 tahun 2007	Perubahan Atas KEPMENKES No. 485 tentang Pengendalian Flu Burung
134	Kepmenkes No.1105 tahun 2007	Pedoman Penanganan Medis Korban Massal Akibat Bencana Kimia
135	Kepmenkes No.1114 tahun 2007	Pedoman Pengadaaan CPNS Th 2007
136	Kepmenkes No.1131 tahun 2007	Penerima Dana BANSOS Pos Kesehatan Pesantren
137	Kepmenkes No.1146 tahun 2007	Pedoman Harga Vaksin Program Imunisasi Th 2008
138	Kepmenkes No.1161 tahun 2007	Penetapan Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Diagnostic Related Group (INA-DRG)
139	Kepmenkes No.1165 tahun 2007	Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum
140	Kepmenkes No.1224 tahun 2007	Pedoman Klasifikasi Dan Kodifikasi Jenis Pemeriksaan, Spesimen, Metode Pemeriksaan Lab Kes



<b>NO</b>	<b>PRODUK HUKUM</b>	<b>TENTANG</b>
141	Kepmenkes No.1225 tahun 2007	Pedoman Sisfo Laboratorium Kesehatan (SILK)
142	Kepmenkes No.116 tahun 2008	Tim Pembina DKR
143	Kepmenkes No.119 tahun 2008	Penerima Dana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
144	Kepmenkes No.128 tahun 2008	Pedoman Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan di Daerah
145	Kepmenkes No.129 tahun 2008	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
146	Kepmenkes No.267 tahun 2008	Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah
147	Kepmenkes No.274 tahun 2008	Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Pelaksanaan Program Jamkesmas
148	Kepmenkes No.298 tahun 2008	Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
149	Kepmenkes No.302 tahun 2008	Harga Obat Generik
150	Kepmenkes No.304 tahun 2008	Panitia Peringatan Hari Malaria Sedunia
151	Kepmenkes No.305 tahun 2008	Pemberhentian Dan Pengangkatan Dewan Pengawas RS Kanker Dharmais
152	Kepmenkes No.350 tahun 2008	Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik Di Rumah Sakit
153	Kepmenkes No.350 tahun 2008	Penetapan Rumah Sakit Pengampu Dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadon
154	Kepmenkes No.406 tahun 2008	Pembentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASI PENA)
155	Kepmenkes No.444 tahun 2008	Penganugerahan Tanda Penghargaan Mandala Karya Bakti Husada Arutala
156	Kepmenkes No.448 tahun 2008	Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala
157	Kepmenkes No.457 tahun 2008	Penetapan Indikator Pencapaian 17 Sasaran Grand Strategy DEPKES RI
158	Kepmenkes No.459 tahun 2008	Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Resiko Bencana
159	Kepmenkes No.483 tahun 2008	Penerima Dana Program Jamkesmas
160	Kepmenkes No.514 tahun 2008	Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jamkesmas 2008
161	Kepmenkes No.519 tahun 2008	Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat
162	Kepmenkes No.538 tahun 2008	Komponen Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Dokter Gigi Spesialis
163	Kepmenkes No.539 tahun 2008	Pedoman Penrimaan Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Gigi
164	Kepmenkes No.603 tahun 2008	Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu Dan Bayi
165	Kepmenkes No.604 tahun 2008	Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C Dan Kelas D
166	Kepmenkes No.606 tahun 2008	Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangka
167	Kepmenkes No.708 tahun 2008	Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural
168	Kepmenkes No.762 tahun 2008	Pemberian Penghargaan Ucapan Terima Kasih MENKES
169	Kepmenkes No.766 tahun 2008	Pengangkatan Tenaga Pelaksana Verifikasi Program JAMKESMAS DKI JAKARTA
170	Kepmenkes No.778 tahun 2008	Pedoman Pelayanan Fisioterapi Di Sarana Kesehatan
171	Kepmenkes No.791 tahun 2008	Daftar Obat Esensial Nasional 2008
172	Kepmenkes No.804 tahun 2008	Honorarium Tenaga Pelaksana Verifikasi Pelaksanaan Program Jamkesmas
173	Kepmenkes No.809 tahun 2008	Kegiatan Posko Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin
174	Kepmenkes No.825 tahun 2008	Pemberlakuan Sistem Elektronik Di Lingkungan DEPKES

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
175	Kepmenkes No.828 tahun 2008	Juknis Standar Pelayanan Minimal
176	Kepmenkes No.857 tahun 2008	Pembentukan Org Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Barang
177	Kepmenkes No.920 tahun 2008	Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS Di RS BLU Dirjen Bina Yanmed
178	Kepmenkes No.922 tahun 2008	Pembagian Urusan Pemerintahan
179	Kepmenkes No.964 tahun 2008	Penetapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia
180	Kepmenkes No.991 tahun 2008	Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada
181	Kepmenkes No.992 tahun 2008	Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada
182	Kepmenkes No.1014 tahun 2008	Standar Pelayanan Radiologi
183	Kepmenkes No.1022 tahun 2008	Pedoman Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik
184	Kepmenkes No.1023 tahun 2008	Pedoman Pengendalian Penyakit Asma
185	Kepmenkes No.1050 tahun 2008	Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan JAMKESMAS
186	Kepmenkes No.1051 tahun 2008	Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
187	Kepmenkes No.1061 tahun 2008	Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji
188	Kepmenkes No.1062 tahun 2008	Penghargaan Bagi Kabupaten-Kota Di Luar Pulau Jawa Yg Telah Menjadi Desa-Kelurahan Siaga
189	Kepmenkes No.1065 tahun 2008	Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 2009
190	Kepmenkes No.1069 tahun 2008	Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
191	Kepmenkes No.1142 tahun 2008	Pedoman Pengendalian Osteoporosis
192	Kepmenkes No.1157 tahun 2008	Daftar Alat Kesehatan Yg Berfungsi Sebagai Obat
193	Kepmenkes No.58 tahun 2009	Pedoman Penyelenggaraan RS Bergerak
194	Kepmenkes No.60 tahun 2009	Testing HIV
195	Kepmenkes No.159 tahun 2009	Penunjukan RSUP Nasional RSCM Jakarta Sebagai Pusat Litbang Dan Pelayanan Medis Sel Puncu
196	Kepmenkes No.160 tahun 2009	Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Program JAMKESMAS
197	Kepmenkes No.230 tahun 2009	Pilot Proyek Pengendalian Flu Burung Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Di Tangerang
198	Kepmenkes No.237 tahun 2009	Standar Kurikulum Pelatihan Fungsional Fisikawan Medik
199	Kepmenkes No.261 tahun 2009	Farmakope Herbal
200	Kepmenkes No.293 tahun 2009	Eliminasi Malaria Di Indonesia
201	Kepmenkes No.300 tahun 2009	Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza
202	Kepmenkes No.311 tahun 2009	Penetapan Penyakit Flu Baru H1N1 Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah
203	Kepmenkes No.314 tahun 2009	Perubahan atas Kepmenkes No.068 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik pada Label Obat
204	Kepmenkes No.316 tahun 2009	Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
205	Kepmenkes No.364 tahun 2009	Pedoman Penanggulangan Tuberkolosis (TB)
206	Kepmenkes No.406 tahun 2009	Kesehatan Jiwa Komunitas
207	Kepmenkes No.421 tahun 2009	Pemeriksaan CTKI
208	Kepmenkes No.442 tahun 2009	Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia
209	Kepmenkes No.443 tahun 2009	Penetapan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
210	Kepmenkes No.444 tahun 2009	Tim Kesiapsiagaan Penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (MEXICAN STRAIN) Nasional

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
211	Kepmenkes No.579 tahun 2009	Penunjukan RS Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Sbg Pusat Litbang Dan Pelayanan Medis
212	Kepmenkes No.830 tahun 2009	Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Obat Dan Vaksin
213	Kepmenkes No.834 tahun 2009	Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca
214	Kepmenkes No.854 tahun 2009	Pengendalian Penyakit Jantung
215	Kepmenkes No.857 tahun 2009	Penilaian Kinerja SDM Kesehatan
216	Kepmenkes No.923 tahun 2009	Laboratorium Pro Justisia
217	Kepmenkes No.1150 tahun 2009	Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan JAMKESMAS 2008
218	Kepmenkes No.1190 tahun 2009	Bansos Program Kebijakan
219	Kepmenkes No.1196 tahun 2009	Pedoman Penyelenggaraan Balai Pengobatan Haji Indonesia Di Arab Saudi
220	Kepmenkes No.1226 tahun 2009	Pedoman Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan
221	Kepmenkes No.1241 tahun 2009	Perubahan atas Kepmenkes No.160 tahun 2009 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi dalam Penyelenggaraan Program Jamkesmas
222	Kepmenkes No.1250 tahun 2009	Kendali Mutu Radiodiagnostik
223	Kepmenkes No.1259 tahun 2009	Juknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Maskin Akibat Bencana, Penghuni Panti Sosial, LAPAS Serta RUTAN
224	Kepmenkes No.1262 tahun 2009	Komnas Pelayanan Darah
225	Kepmenkes No.1278 tahun 2009	TB dan HIV
226	Kepmenkes No.068 tahun 2010	Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
227	Kepmenkes No.095 tahun 2010	Jaminan Kesehatan Masyarakat
228	Kepmenkes No.146 tahun 2010	Harga Obat Generik
229	Kepmenkes No.148 tahun 2010	Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
230	Kepmenkes No.149 tahun 2010	Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
231	Kepmenkes No.156 tahun 2010	Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan
232	Kepmenkes No.159 tahun 2010	Pengawasan Obat Generik
233	Kepmenkes No.160 tahun 2010	RENSTRA 2010-2014
234	Kepmenkes No.217 tahun 2010	Pencabutan Atas Keputusan MENKES RI Nomor 116-MENKES-SK-II-2008 Ttg Tim Pembina DKR
235	Kepmenkes No.262 tahun 2010	Pedoman Terapi Stimulasi Sensorik
236	Kepmenkes No.263 tahun 2010	Rehabilitasi Kognitif
237	Kepmenkes No.264 tahun 2010	Intelegensia Degeneratif
238	Kepmenkes No.265 tahun 2010	Komunikasi Otak
239	Kepmenkes No.289 tahun 2010	Pilot Proyek Flu Burung
240	Kepmenkes No.316 tahun 2010	Harga Vaksin Program Imunisasi Tahun 2010
241	Kepmenkes No.317 tahun 2010	Tenaga Kesehatan Asing
242	Kepmenkes No.329 tahun 2010	Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan Di DTPK Tahun 2010
243	Kepmenkes No.340 tahun 2010	Klasifikasi Rumah Sakit
244	Kepmenkes No.400 tahun 2010	Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia
245	Kepmenkes No.410 tahun 2010	Perubahan KMK No.1014 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi
246	Kepmenkes No.422 tahun 2010	NAPZA
247	Kepmenkes No.482 tahun 2010	Gerakan Imunisasi Nasional GAIN UCI
248	Kepmenkes No.493 tahun 2010	Penetapan Kabupaten-Kota Pelaksana Pemeriksaan Dan Pembinaan Kesehatan Haji 2010
249	Kepmenkes No.494 tahun 2010	Bantuan Operasional Kesehatan
250	Kepmenkes No.686 tahun 2010	Jaminan Kesehatan Masyarakat
251	Kepmenkes No.796 tahun 2010	Kanker Rahim

<b>NO</b>	<b>PRODUK HUKUM</b>	<b>TENTANG</b>
252	Kepmenkes No.834 tahun 2010	High Care Unit
253	Kepmenkes No.904 tahun 2010	Penasehat Ahli Imunisasi
254	Kepmenkes No.908 tahun 2010	Pelayanan Keperawatan Keluarga
255	Kepmenkes No.1627 tahun 2010	Kegawatdaruratan Psikiatrik
256	Kepmenkes No.1981 tahun 2010	Pedoman Akutansi BLU RS
257	Kepmenkes No.57 tahun 2011	Administrasi PERJADIN Ke Luar Negeri
258	Kepmenkes No.91 tahun 2011	Unit Percepatan Pembangunan Papua Dan Papua Barat
259	Kepmenkes No.206 tahun 2011	Panitia Penyusunan Suplemen I Farmakope Herbal
260	Kepmenkes No.221 tahun 2011	Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
261	Kepmenkes No.335 tahun 2011	Tim Pendirian WHO CC
262	Kepmenkes No.418 tahun 2011	Susunan Keanggotaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit
263	Kepmenkes No.652 tahun 2011	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
264	Kepmenkes No.721 tahun 2011	Pengangkatan Anggota MKDKI Tahun 2011-2016
265	Kepmenkes No.782 tahun 2011	RS Rujukan Bagi Orang Dengan HIV AIDS (ODHA)
266	Kepmenkes No.923 tahun 2011	Tim Pengelola Tugas Belajar SDM Kementerian Kesehatan
267	Kepmenkes No.1021 tahun 2011	Sentra Pelatihan Gender Bidang Kesehatan
268	Kepmenkes No.1030 tahun 2011	Kabupaten Kota Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Haji
269	Kepmenkes No.1085 tahun 2011	Tim Koordinasi JAMKESMAS Dan Bantuan Operasional Kesehatan 2011
270	Kepmenkes No.1251 tahun 2011	Tim Pelaksana BIDKES Sail Wakatobi Belitong 2011
271	Kepmenkes No.1432 tahun 2011	Kelompok Kerja Health Tourism Indonesia
272	Kepmenkes No.1435 tahun 2011	Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat
273	Kepmenkes No.1488 tahun 2011	Izin Operasional Tetap RSUD Dr. Soetomo Surabaya
274	Kepmenkes No.1490 tahun 2011	Petugas Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota
275	Kepmenkes No.1621 tahun 2011	Keanggotaan Komite Farmasi Nasional
276	Kepmenkes No.1755 tahun 2011	Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
277	Kepmenkes No.1795 tahun 2011	Penugasan PT ASKES Dalam Pengelolaan JAMKESMAS
278	Kepmenkes No.1799 tahun 2011	Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat
279	Kepmenkes No.1873 tahun 2011	Sentra Pelatihan Pencegahan NAPZA
280	Kepmenkes No.1874 tahun 2011	Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Reproduksi
281	Kepmenkes No.2051 tahun 2011	Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, Dan Komplementer
282	Kepmenkes No.2345 tahun 2011	Pemberlakuan Suplemen II Farmakope Herbal
283		
284	Kepmenkes No.52 tahun 2012	Penerima Dana JAMKESMAS Dan JAMPERSAL TA 2012
285	Kepmenkes No.57 tahun 2012	Izin Pelayanan TRB RS Gading Pluit Jakarta
286	Kepmenkes No.58 tahun 2012	Percepatan Pembangunan Papua Dan Papua Barat Dalam BIDKES
287	Kepmenkes No.92 tahun 2012	Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012
288	Kepmenkes No.94 tahun 2012	Harga Obat Pengadaan Untuk Pemerintah 2012
289	Kepmenkes No.103 tahun 2012	Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan Leptospira
290	Kepmenkes No.108 tahun 2012	Kebijakan Dasas Pusat Kesehatan Masyarakat
291	Kepmenkes No.131 tahun 2012	Forum Gerakan Berantas Kembali Malaria
292	Kepmenkes No.132 tahun 2012	Izin Tanaman Papaver, Ganja Dan Koka
293	Kepmenkes No.133 tahun 2012	Advokasi Dan Sosialisasi Imunisasi Tingkat Nasiona
294	Kepmenkes No.137 tahun 2012	Pola Klasifikasi Arsip
295	Kepmenkes No.153 tahun 2012	Penugasan PT ASKES Dalam Program JAMKESMAS

<b>NO</b>	<b>PRODUK HUKUM</b>	<b>TENTANG</b>
296	Kepmenkes No.155 tahun 2012	Komisi Nasional Sainifikasi Jamu
297	Kepmenkes No.156 tahun 2012	Panitia Gerakan Kebersihan Kantor
298	Kepmenkes No.163 tahun 2012	Izin Pelayanan Reproduksi Berbantu Di RSU Telogorejo Semarang
299	Kepmenkes No.167 tahun 2012	Penugasan PT ASKES Dalam Manajemen Kepesertaan JAMKESMAS
300	Kepmenkes No.171 tahun 2012	Perpanjangan Pelayanan JAMKESMAS Bagi Korban Merapi
301	Kepmenkes No.172 tahun 2012	Perubahan Atas KEPMENKES 1334 tentang KOMNAS Sainifikasi Jamu
302	Kepmenkes No.176 tahun 2012	POKJA Persiapan Pelaksanaan SJSN
303	Kepmenkes No.182 tahun 2012	Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan KEMENKES
304	Kepmenkes No.189 tahun 2012	Izin Operasional Sementara RS Khusus Gigi Dan Mulut UNPAD
305	Kepmenkes No.191 tahun 2012	Perubahan Atas KEPMENKES 1873 Ttg Sentra Pelatihan NAPZA
306	Kepmenkes No.194 tahun 2012	Laboratorium Narkotika Dan Psicotropika
307	Kepmenkes No.195 tahun 2012	Lomba Gerakan Kebersihan Kantor KEMENKES
308	Kepmenkes No.202 tahun 2012	Izin Pelayanan Reproduksi Berbantu RSIA Melinda Bandung
309	Kepmenkes No.203 tahun 2012	Izin Pelayanan Reproduksi Berbantu RSIA Sammarie Basra JAKTIM
310	Kepmenkes No.210 tahun 2012	Perubahan Atas KEPMENKES No. 1755 Ttg Keanggotaan BPRS
311	Kepmenkes No.212 tahun 2012	Izin RS Khusus Gigi Dan Mulut UI
312	Kepmenkes No.221 tahun 2012	PIN Dalam Rangka RB Dan Raih WTP
313	Kepmenkes No.224 tahun 2012	Panitia Konferensi Asia Timur Sanitasi Dan Higiene Ke-3
314	Kepmenkes No.225 tahun 2012	Izin Operasional RS Khusus Gigi Dan Mulut Mahasaraswati
315	Kepmenkes No.226 tahun 2012	Izin Operasional RSU Inco Sorowako
316	Kepmenkes No.231 tahun 2012	Komite Sel Punca
317	Kepmenkes No.232 tahun 2012	Izin RS Khusus Gigi Dan Mulut
318	Kepmenkes No.246 tahun 2012	Izin Operasional RS Kanker Dharmais Jakarta
319	Kepmenkes No.249 tahun 2012	Panitia Peringatan HKS Ke-48 Tahun 2012
320	Kepmenkes No.251 tahun 2012	Komite Keselamatan Pasien RS
321	Kepmenkes No.258 tahun 2012	Izin Operasional RS Jantung Harapan Kita
322	Kepmenkes No.269 tahun 2012	Izin Operasional RSUP Sanglah Denpasar
323	Kepmenkes No.271 tahun 2012	Perubahan Kedua Atas KEPMENKES No. 008 Ttg Dana Dekon TA 2012
324	Kepmenkes No.291 tahun 2012	Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke 5
325	Kepmenkes No.292 tahun 2012	Izin Operasional RS Gigi Dan Mulut Univ DR Moestopo
326	Kepmenkes No.341 tahun 2012	Perubahan Ketiga Atas KEPMENKES No. 008 Ttg Dana DEKON TA 2012
327	Kepmenkes No.342 tahun 2012	Koordinasi Bidang Jasa Dan Penanam Modal Produk Kesehatan
328	Kepmenkes No.352 tahun 2012	Koordinasi Bidang Jasa Dan Penanam Modal Produk Kesehatan
329	Kepmenkes No.374 tahun 2012	Panitia Peringatan HKJS Ke-48 Tahun 2012
330	Kepmenkes No.383 tahun 2012	Izin Operasional RSU Santosa Hospital Bandung
331	Kepmenkes No.414 tahun 2012	Izin Operasional Tetap RSUPAD Gatot Subroto
332	Kepmenkes No.415 tahun 2012	Izin Operasional Tetap RSJ Daerah Surakarta
333	Kepmenkes No.421 tahun 2012	Panitia Penyusunan RUU Karantina Kesehatan
334	Kepmenkes No.424 tahun 2012	Kelompok Kerja E-Health
335	Kepmenkes No.027 tahun 2013	Pemberhentian Ketua MTKI Dan PLT Ketua MTKI



NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
336	Kepmenkes No.069 tahun 2013	Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
337	Kepmenkes No.089 tahun 2013	Formularium Program JAMKESMAS
338	Kepmenkes No.108 tahun 2013	Penugasan PT (ASKES) Persero dalam Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2013
339	Kepmenkes No.109 tahun 2013	Paten Obat Antiviral Dan Antiretroviral
340	Kepmenkes No. 220 tahun 2013	Tim Binaan Wilayah Kesehatan
341	Kepmenkes No. 312 tahun 2013	Daftar Obat Esensial Nasional 2013
342	Kepmenkes No. 326 tahun 2013	Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
343	Kepmenkes No. 328 tahun 2013	Formularium Nasional
344	Kepmenkes No. 455 tahun 2013	Asosiasi Fasilitas Kesehatan
345	Kepmenkes No.159 tahun 2014	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/MENKES/SK/IX/2013 Tentang Formularium Nasional
346	Kepmenkes No.151 tahun 2016	Dewan Pertimbangan Klinis
347	Kepmenkes No.252 tahun 2016	Asosiasi Fasilitas Kesehatan
348	Kepmenkes No.262 tahun 2016	Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan
349	Kepmenkes No.14 tahun 2017	Komite Penanggulangan Kanker Nasional
350	Kepmenkes No.35 tahun 2017	Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
351	Kepmenkes No.45 tahun 2017	Pelaksanaan Kampanye Dan Introduksi Imunisasi Measles Rubella Di Indonesia
352	Kepmenkes No.70 tahun 2017	Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Sebagai Rumah Sakit Pendidikan
353	Kepmenkes No.95 tahun 2017	Tim Koordinasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
354	Kepmenkes No.107 tahun 2017	Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional
355	Kepmenkes No.108 tahun 2017	Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Pertama Tahun 2017
356	Kepmenkes No.109 tahun 2017	Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional
357	Kepmenkes No.117 tahun 2017	Pelaksanaan Kampanye Dan Introduksi Imunisasi Japanese Encephalitis Di Provinsi Bali
358	Kepmenkes No.126 tahun 2017	Komite Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia
359	Kepmenkes No.129 tahun 2017	Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
360	Kepmenkes No.130 tahun 2017	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/H.V/SK/169/2016 Tentang Peserta Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berasal Dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2016
361	Kepmenkes No.131 tahun 2017	Penunjukan Dan Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kedua Tahun 2017
362	Kepmenkes No.174 tahun 2017	Komite Verifikasi Nasional Eliminasi Campak Dan Pengendalian Rubella (Congenital Rubella Syndrome)
363	Kepmenkes No.175 tahun 2017	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/161/2015 Tentang Pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat

NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
364	Kepmenkes No.186 tahun 2017	Panitia Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia Tahun 2017
365	Kepmenkes No.187 tahun 2017	Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia
366	Kepmenkes No.191 tahun 2017	Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Campak Dan Pengendalian Rubela (Congenital Rubela Syndrome)
367	Kepmenkes No.194 tahun 2017	Pelaksanaan Demonstrasi Pemberian Imunisasi Human Papillomavirus Di Kota Surabaya, Kota Manado, Dan Kota Makassar
368	Kepmenkes No.195 tahun 2017	Panitia Peringatan Hari Pendengaran Sedunia Tahun 2017
369	Kepmenkes No.199 tahun 2017	Pelaksanaan Demonstrasi Pemberian Imunisasi Pneumokokus Konyugasi Di Kabupaten Lombok Barat Dan Kabupaten Lombok Timur
370	Kepmenkes No.204 tahun 2017	MARS Perkemahan Bakti Satuan Karya Bakti Husada Tingkat Nasional
371	Kepmenkes No.211 tahun 2017	Panitia Peringatan Hari Malaria Sedunia Tahun 2017
372	Kepmenkes No.216 tahun 2017	Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Delapan Belas Tahap Kedua Tahun 2017
373	Kepmenkes No.228 tahun 2017	Panitia Peringatan Hari Kesehatan Sedunia Tahun 2017
374	Kepmenkes No.232 tahun 2017	Pengangkatan Tenaga Kesehatan Dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Periode I Tahun 2017
375	Kepmenkes No.236 tahun 2017	Kelompok Kerja Penguatan Implementasi Dokter Layanan Primer
376	Kepmenkes No.259 tahun 2017	Kelompok Kerja Diagnosis Dan Pengobatan Malaria
377	Kepmenkes No.272 tahun 2017	Tim Penyelenggara Simulasi Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Di Provinsi Banten
378	Kepmenkes No.273 tahun 2017	Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat
379	Kepmenkes No.274 tahun 2017	Panitia Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Nasional
380	Kepmenkes No.342 tahun 2017	Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Sepsis
381	Kepmenkes No.350 tahun 2017	Rumah Sakit Dan Balai Kesehatan Pelaksana Layanan Tuberkulosis Resistan Obat
382	Kepmenkes No.354 tahun 2017	Tim Asistensi Arab Saudi Bidang Kesehatan Tahun 1438H/2017M
383	Kepmenkes No.355 tahun 2017	Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Tahun 1438H/2017M
384	Kepmenkes No.359 tahun 2017	Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Intraabdominal
1	SE Menkes No.31 tahun 2014	Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2	SE Menkes No.32 tahun 2014	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
<b>BADAN PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN (BPJS)</b>		
1	Perdir BPJS No.1 tahun 2014	Pevelenggaraan Jaminan Kesehatan
<b>KEMENTERIAN TENAGA KERJA</b>		



NO	PRODUK HUKUM	TENTANG
1	Permenakertrans No.23 tahun 2006	Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
2	Permenakertrans No.12 tahun 2007	Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3	Permenakertrans No.20 tahun 2007 <sup>50</sup>	Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
4	Permenakertrans No.24 tahun 2007	Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja (TKLHK)
5	Permenakertrans No.4 tahun 2009	Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-27/Men/II/2009 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
6	Permenakertrans No.7 tahun 2010	Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
7	Permenakertrans No.13 tahun 2012	Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
8	Permenaker No.2 tahun 2015	Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
9	Kepmenaker No. 27 tahun 2009 <sup>51</sup>	Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
10	Kepmenakertrans No.157 tahun 2003 <sup>52</sup>	Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
11	SE Menakertrans Nomor SE.1/MEN/III/2014	Pengawasan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial pada BPJS
<b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b>		
	Permenkeu No.190 tahun 2012	Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
1	Permenkeu No.205 tahun 2013	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah
2	Permenkeu No.206 tahun 2013	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan PBI
<b>KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)</b>		
1	SE Menteri BUMN No.91 tahun 2013	Penugasan Kepada PT ASKES (Persero)
<b>OTORITAS JASA KEUANGAN</b>		
1	Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013	Pengawasan BPJS oleh Otoritas Jasa Keuangan

<sup>50</sup> Diganti Permenakertrans No.7 tahun 2010

<sup>51</sup> Diganti Permenakertrans No.4 tahun 2009

<sup>52</sup> Diganti Permenakertrans No.20 tahun 2007